



# Potensi Tumbuhan dan Hewan Lokal untuk Rehabilitasi Areal Bekas Tebangan KOPERMAS dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Adat

Max J. Tokede, Patria Hadi dan Widodo

### **Forests and Governance Programme Series**

1. a. A Rough Guide to Developing Laws for Regional Forest Management. 2004  
*Jason M. Patlis*  
b. Pedoman Umum Penyusunan Peraturan Daerah Pengelolaan Hutan. 2004  
*Jason M. Patlis*
2. Desentralisasi ancaman dan harapan bagi masyarakat adat. 2004  
*Hendra Gunawan*
3. Brief on the Planned United Fiber System (UFS) Pulp Mill Project for South Kalimantan, Indonesia. 2004  
*Emile Jurgens, Christopher Barr, Christian Cossalter*
4. Kepentingan Nasional atau Lokal? Konflik Penguasaan Lahan di Hutan Penelitian Sebulu di Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur  
*Catur Budi Wiati*
5. Kebijakan Pemerintah Pusat di Bidang Konservasi dari Perspektif Daerah dan Masyarakat Studi Kasus Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur: Studi Kasus Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur  
*Eddy Mangopo Angi*
6. Integrasi hak pemanfaatan tanah masyarakat Dayak dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten. Studi di Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah.  
*Mayang Meilantina*
7. Dapatkah Pengelolaan Kolaboratif Menyelamatkan Taman Nasional Danau Sentarum?  
*Gusti Z. Anshari*
8. Ketergantungan, Persepsi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Sumberdaya Hayati Hutan. Studi Kasus di Dusun Pampli Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan  
*Putu Oka Ngakan, Heru Komarudin, Amran Achmad, Wahyudi dan Akhmad Tako*

# Potensi Tumbuhan dan Hewan Lokal untuk Rehabilitasi Areal Bekas Tebangan KOPERMAS dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Adat

Max J. Tokede, Patria Hadi dan Widodo

© 2006 oleh Center for International Forestry Research  
Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang  
Diterbitkan tahun 2006  
Dicetak oleh Intiprima Karya, Jakarta

ISBN 979-24-4668-0

Foto oleh Patria Hadi, Sulfikar Mardiyadi dan Widodo  
Desain dan tata letak oleh Vidya Fitriani

Diterbitkan oleh  
**Center for International Forestry Research**  
Alamat pos: P.O. Box 6596 JKPWB, Jakarta 10065, Indonesia  
Alamat kantor: Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang,  
Bogor Barat 16680, Indonesia  
Tel.: +62 (251) 622622  
Fax.: +62 (251) 622100  
E-mail: [cifor@cgiar.org](mailto:cifor@cgiar.org)  
Situs: <http://www.cifor.cgiar.org>

# Daftar Isi

Kata Pengantar	vii
<b>Pendahuluan</b>	<b>1</b>
Latar Belakang	1
Kerangka Pemikiran	1
Tujuan	2
Manfaat dan Kontribusi	2
<b>Metode Penelitian</b>	<b>3</b>
Tempat dan Waktu	3
Obyek dan Alat	3
Metode Penelitian	3
Variabel dan Data yang Dikumpulkan	4
Pengumpulan Data	4
Analisis Data	4
<b>Hasil dan Pembahasan</b>	<b>5</b>
Profil Masyarakat Adat	5
<i>Sistem Keekerabatan</i>	5
<i>Pola Kepemilikan dan Penguasaan Lahan Adat</i>	5
<i>Sosial Ekonomi Pemilik Lahan Adat</i>	6
<i>Sarana dan Prasarana</i>	12
Kondisi Areal Bekas Tebangan	13
<i>Tanah dan Topografi</i>	13
<i>Potensi Pohon Komersil</i>	13
<i>Tumbuhan dan Hewan Liar</i>	15
Pemanfaatan Areal Bekas Tebangan	16
Tata Hidup Masyarakat Adat	16
<i>Persepsi Masyarakat Adat terhadap Hutan</i>	16
<i>Aspirasi Masyarakat Adat terhadap Masa depannya</i>	17
Kapasitas Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumberdaya Alamnya	20
<i>Perladangan Berpindah</i>	20
<i>Pemeliharaan Ternak</i>	20
<i>Pengelolaan Kakao</i>	21
<i>Pengelolaan Buah Merah</i>	22
<i>Pengelolaan Komoditas Lain</i>	22

<b>Kesimpulan dan Rekomendasi</b>	23
Kesimpulan	23
Rekomendasi	24
<b>Daftar Pustaka</b>	25

# Daftar Tabel & Gambar

## Tabel

1.	Distribusi pemilik hak adat pada KOPERMAS Putra Bondi Indah dan KOPERMAS Meyaususra menurut kampung asal (tempat tinggal)	7
2.	Tanaman budidaya masyarakat adat pemilik areal konsesi KOPERMAS Putra Bondi Indah dan KOPERMAS Meyaususra	11
3.	Hewan peliharaan masyarakat adat pemilik areal konsesi KOPERMAS Putra Bondi Indah dan KOPERMAS Meyaususra	11
4.	Alokasi dana kompensasi hasil kayu masyarakat pemilik adat areal konsesi KOPERMAS Putra Bondi Indah dan KOPERMAS Meyaususra	12
5.	Potensi pohon komersial areal bekas tebangan KOPERMAS Putra Bondi Indah dan KOPERMAS Meyaususra	14
6.	Nilai indikator aspirasi masyarakat adat terhadap masa depannya	18

## Gambar

1.	Lokasi areal konsesi KOPERMAS Meyaususra dan Putra Bondi Indah, Kabupaten Manokwari	3
2.	Komposisi marga pemilik hak adat KOPERMAS Putra Bondi Indah dan Meyaususra	5
3.	Pola pemilikan dan penguasaan sumberdaya Suku Besar Arfak	6
4.	Pemilik hak adat areal konsesi KOPERMAS Putra Bondi Indah dan Meyaususra menurut umur	6
5.	Pemilik hak adat areal konsesi KOPERMAS Putra Bondi Indah dan Meyaususra menurut tingkat pendidikan	7
6.	Sebaran pemukiman dan ladang terhadap areal konsesi KOPERMAS Meyaususra, Distrik Manokwari, Manokwari	8
7.	Sebaran pemukiman dan ladang terhadap areal konsesi KOPERMAS Putra Bondi Indah, Distrik Ransiki, Manokwari	8
8.	Pemilik hak adat areal konsesi KOPERMAS Putra Bondi Indah dan KOPERMAS Meyaususra menurut mata pencaharian	9
9.	Hewan yang umum dipelihara masyarakat adat	9
10.	Tanaman Kakao yang telah dibudidayakan masyarakat dan merupakan komoditas unggulan	9
11.	Salah satu fasilitas perbankan yang tersedia di Ransiki	13
12.	Kondisi tegakan areal bekas tebangan KOPERMAS yang relatif masih baik, karena hanya sedikit yang ditebang	13

13. Jenis Pandan penghasil Buah Merah yang banyak tumbuh di hutan ulayat dapat menjadi sarana peningkatan perekonomian masyarakat adat	15
14. Terbukanya akses melalui jalan <i>logging</i> telah memotivasi masyarakat membuka lahan pertanian di sepanjang kiri-kanan jalan	16
15. Tumpukan kayu gergajian yang diolah dari areal bekas tebangan KOPERMAS	16
16. Kurang intensifnya pemeliharaan menyebabkan tanaman Kakao banyak diserang hama. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan petani dan mahalnnya harga pestisida sehingga masyarakat enggan membelinya	21
17. Cara pengeringan biji kakao yang dilakukan masyarakat adat adalah dengan menjemurnya di jalan aspal atau di atas terpal. Inovasi teknologi, misalnya introduksi alat pengering tenaga surya akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas biji	21
18. Produk dari <i>Pandanus canoideus</i> berupa Buah Merah yang di pasar setempat berharga sekitar Rp 50.000 per buah dan minyak ekstrak buah merah yang dijual di pasaran dengan harga Rp 150.000 per 100 ml	22

# Kata Pengantar

Laporan akhir penelitian kasus dengan judul “Potensi Tumbuhan dan Hewan Lokal Untuk Rehabilitasi Areal Bekas Tebangan KOPERMAS dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Adat” ini merupakan pertanggungjawaban atas realisasi kerjasama penelitian antara Center for International Forestry Research (CIFOR) dengan Fakultas Kehutanan Universitas Negeri Papua (FAHUTAN-UNIPA), Manokwari. Kegiatan yang hasilnya disajikan dalam laporan ini merupakan kelanjutan dari penelitian sebelumnya yang bertema “*Can Decentralization Work for Forest and the Poor? Policy Research to Promote Sustainable Forest Management, Equitable Economic Development, and Secure Local Livelihoods in Indonesia*”.

Penelitian kasus ini mengambil lokasi di dua areal bekas tebangan KOPERMAS yaitu KOPERMAS Putra Bondi Indah di Ransiki dan KOPERMAS Meyaususra di Nuni, Kabupaten Manokwari. Penelitian berlangsung dari bulan Juni sampai dengan September 2005. Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode penelitian partisipatif (*Participatory Research Method*).

Terselesainya laporan ini tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, terutama pihak pengurus KOPERMAS, pemerintah distrik, masyarakat lokal pemilik ulayat dan instansi teknis terkait. Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih atas berbagai informasi yang telah diberikan selama penelitian. Secara khusus, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Hendra Gunawan dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Departemen Kehutanan, dan Sdr Heru Komarudin, CIFOR, yang telah membaca ulang dan memberikan banyak masukan terhadap laporan ini.

Penghargaan yang tinggi disampaikan kepada CIFOR dan European Union (EU) melalui Program Biodiversity and Livelihoods yang telah memberikan kepercayaan kepada Fakultas Kehutanan Universitas Negeri Papua Manokwari untuk melaksanakan penelitian ini. Secara khusus, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Doris Capistrano PhD, Direktur Forests and Governance Programme, beserta staf Sdri. Yunety Tarigan, atas nasehat dan bantuannya sejak dimulainya penelitian sampai laporan ini diterbitkan.

Semoga informasi yang tertuang dalam laporan hasil penelitian kasus ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukannya.

Manokwari, September 2006  
Lakhar Dekan,

Max J. Tokede



# Pendahuluan

## Latar Belakang

Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, tuntutan masyarakat lokal dalam proses pengelolaan hutan adatnya semakin meningkat. Hal ini ditandai dengan banyaknya Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) yang didirikan sebagai wadah masyarakat adat untuk mengelola hutan. Dengan dasar Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 317/Kpts-II/1999 tentang Hak Pemungutan Hasil Hutan Masyarakat Hukum Adat Pada Areal Hutan Produksi, KOPERMAS tersebut diberi Ijin Pemanfaatan Kayu-Masyarakat Adat (IPK-MA). Sejak tahun 1999 hingga 2003 tercatat sebanyak 441 KOPERMAS yang diberi IPK-MA di Provinsi Papua dan Irian Jaya Barat (Worembai, 2003).

IPK-MA dalam prakteknya tidak memenuhi sasaran yang diharapkan. Penyebab utama adalah penyalahgunaan dan pemindahtanganan izin kepada investor mitra kerja KOPERMAS. Akibatnya kerusakan tegakan tinggal dan keterbukaan areal meningkat, sedangkan penerimaan tunai rumah tangga masyarakat adat tetap (Tokede, et al, 2004). Oleh karena itu, tahun 2005 seluruh kegiatan pengelolaan hutan oleh KOPERMAS dibekukan. Pembekuan tersebut dilakukan dengan pencabutan Kepmenhut Nomor 317 Kpts-II/1999 melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.07/Menhut-II/2005.

Tujuan kebijakan desentralisasi pengelolaan sumberdaya hutan adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan terjaminnya kelestarian hutan melalui pengelolaan hutan lestari berbasis masyarakat lokal (masyarakat adat). Tujuan kebijakan tersebut belum dapat diwujudkan karena belum ada peraturan daerah yang dikeluarkan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten yang bisa dijadikan acuan. Akibatnya

terjadi penyimpangan dalam implementasi kebijakan tersebut. Kerusakan areal hutan adat semakin meningkat, kualitas lingkungan terus menurun, sementara itu belum terlihat adanya peningkatan kesejahteraan yang berarti bagi masyarakat adat (Widodo, 2002).

## Kerangka Pemikiran

Bagi masyarakat adat, hutan adalah sumber kehidupan mereka. Kerusakan hutan adat akan berdampak pada berkurangnya kesempatan untuk memanfaatkan sumberdaya alam yang dimiliki guna mencukupi kebutuhan hidup mereka. Kondisi demikian telah memicu munculnya masalah sosial dan masalah lingkungan. Simon (1993) menyatakan bahwa kemiskinan akan memicu terjadinya kerusakan hutan, dan sebaliknya rusaknya hutan akan menimbulkan kemiskinan. Untuk menanggulangi masalah tersebut perlu segera diupayakan tindakan rehabilitasi yang sekaligus dapat meningkatkan nilai manfaat sumberdaya areal bekas tebangan KOPERMAS sehingga dapat menunjang kehidupan masyarakat adat secara berkesinambungan.

Upaya rehabilitasi dan peningkatan nilai manfaat areal bekas tebangan KOPERMAS akan sulit mencapai hasil yang diharapkan jika tidak sesuai dengan aspirasi dan kapasitas masyarakat, terutama dalam mengadopsi teknologi yang ditawarkan. Oleh karena itu, alternatif teknologi/metode rehabilitasi dan pemanfaatan areal bekas tebangan KOPERMAS yang akan ditawarkan kepada masyarakat adat harus dirancang sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan aspirasi mereka dan sedapat mungkin memanfaatkan sumberdaya lokal yang sudah dikenal oleh masyarakat adat, termasuk kesesuaian dengan budaya mereka.

Sebagai langkah awal untuk mencapai tujuan tersebut telah dilakukan pengkajian tentang potensi tumbuhan dan hewan lokal, serta aspirasi masyarakat adat tentang pemanfaatan aset adat untuk peningkatan kesejahteraan mereka.

## Tujuan

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi keragaman jenis tumbuhan dan hewan, baik liar maupun budidaya, persepsi dan aspirasi masyarakat adat dalam rangka rehabilitasi hutan bekas tebangan KOPERMAS dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adat. Secara khusus, penelitian bertujuan untuk :

1. Mengetahui jenis-jenis tumbuhan dan hewan, baik yang liar maupun yang sudah umum dipelihara oleh masyarakat adat, intensitas pengelolaan yang selama ini dilakukan dan peluang pengembangannya.
2. Mengetahui kelayakan teknis dan ekonomis jenis-jenis tumbuhan yang potensial, untuk dibudidayakan secara komersial.

3. Mengetahui tingkat kehidupan yang ingin dicapai oleh masyarakat adat.
4. Mengetahui keinginan masyarakat dalam pemanfaatan areal bekas tebangan KOPERMAS di lahan adat mereka.

## Manfaat dan Kontribusi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menyediakan data mengenai tumbuhan dan satwa yang potensial untuk dikembangkan pada areal bekas tebangan KOPERMAS sesuai dengan aspirasi dan kapasitas masyarakat adat untuk mengelolanya. Dengan data tersebut diharapkan dapat dirancang teknologi penggunaan lahan bekas tebangan yang lebih produktif dan berkelanjutan serta dapat diterapkan oleh masyarakat adat sehingga mampu mencukupi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

# Metode Penelitian

## Tempat dan Waktu

Penelitian dilaksanakan di areal bekas tebangan KOPERMAS Meyaususra, Nuni dan KOPERMAS Putra Bondi Indah, Ransiki, Manokwari (Gambar 1). Penelitian berlangsung selama 4 bulan, yaitu dari bulan Juni 2005 sampai dengan bulan September 2005.

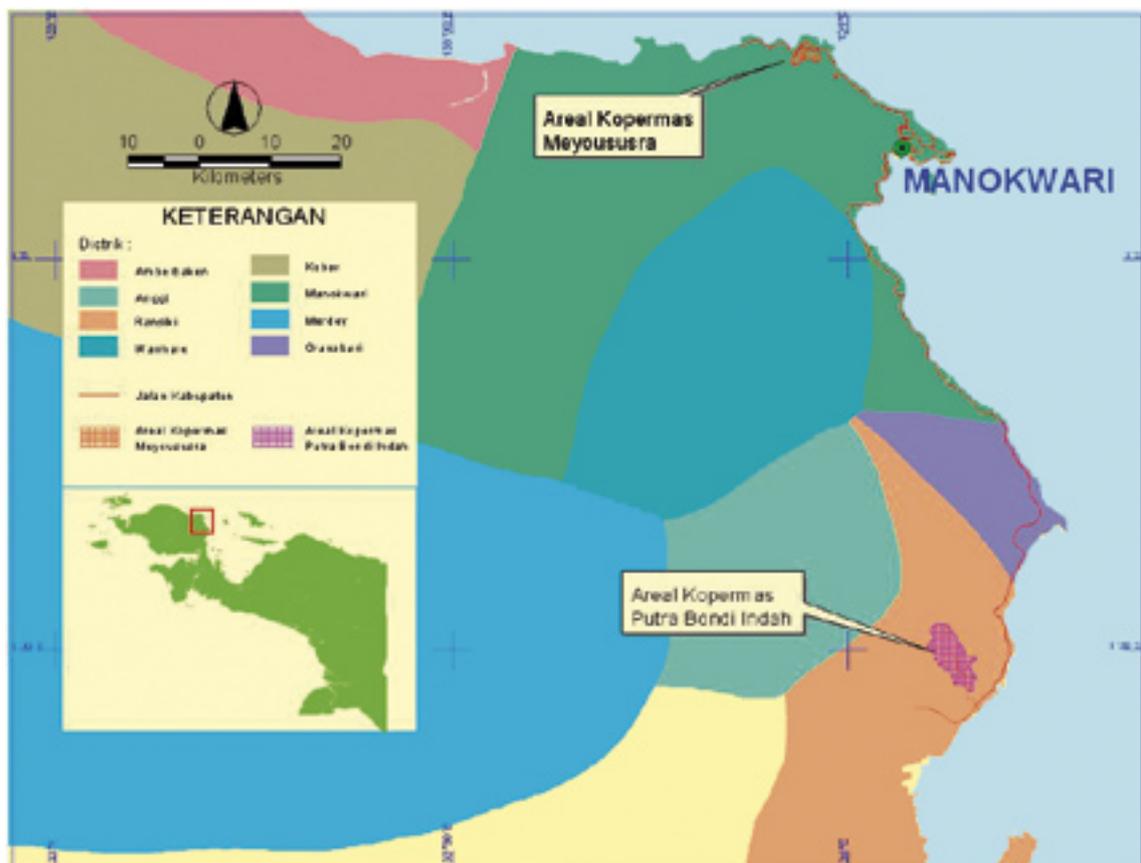
## Obyek dan Alat

Obyek penelitian ini adalah masyarakat adat pemilik hutan yang menjadi areal bekas tebangan

KOPERMAS Meyaususra dan KOPERMAS Putra Bondi Indah. Alat yang digunakan antara lain *tally sheet*, kuesioner, kamera, *tape-recorder* dan GPS.

## Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan metode studi kasus dengan teknik survei. Sebagai kasus adalah areal bekas penebangan KOPERMAS Meyaususra dan KOPERMAS Putra Bondi Indah serta masyarakat adat pemilik hutan.



Gambar 1. Lokasi areal konsesi KOPERMAS Meyaususra dan Putra Bondi Indah, Kabupaten Manokwari (Sumber: BPPS Jakarta tahun 2000 dan hasil observasi lapangan)

## Variabel dan Data yang Dikumpulkan

Data dan variabel potensi tumbuhan dan hewan untuk rehabilitasi bekas tebangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adat terdiri dari:

1. Jenis tumbuhan dan hewan yang sudah dibudidayakan dan tumbuhan dan hewan liar yang potensial untuk dibudidayakan, meliputi: nama jenis (lokal/latin) dan lokasi ditemukan;
2. Kondisi biofisik areal bekas tebangan, meliputi jenis tanah, topografi, jenis dan jumlah pohon komersial, jenis tumbuhan dan hewan liar;
3. Pemanfaatan oleh masyarakat adat (ranking komoditas): bagian yang dimanfaatkan; cara pengambilan; yang melakukan pengambilan; bentuk pemanfaatan (konsumsi/dijual/obat/ritual adat);
4. Potensi pasar: proporsi yang terjual dari total produksi; frekuensi penjualan; harga jual/satuan; penentu harga (pemilik/pembeli/tawar-menawar/pemerintah); tempat penjualan (di pasar/pembeli datang); bentuk penjualan (mentah; diolah);
5. Kapasitas masyarakat adat untuk mengelola dan mengolah hasil: lokasi penanaman, sistem penanaman, lokasi pemeliharaan ternak; kegiatan perawatan/pemeliharaan yang dilakukan (jenis kegiatan, frekuensi); sumber input (lokal/beli); pelaku perawatan (bapak/ibu/anak/tenaga luar); pengolahan paska panen (bentuk, lokasi pengolahan, pelaku).

Data dan variabel yang diamati untuk menilai persepsi dan aspirasi masyarakat adat dalam pemanfaatan aset adat untuk meningkatkan taraf hidupnya antara lain:

1. Profil masyarakat adat: sistem kekerabatan, pola kepemilikan dan penguasaan lahan;
2. Kondisi sosial ekonomi masyarakat pemilik lahan adat: umur, tingkat pendidikan, domisili (lokasi pemukiman), sumber dan tingkat pendapatan keluarga (jumlah, sumber), alokasi pemanfaatan; fasilitas umum/ sarana prasarana umum (pendidikan, transportasi dan komunikasi) dan perekonomian.
3. Pemanfaatan areal bekas tebangan, termasuk persepsi masyarakat adat tentang hutan dan aspirasi masyarakat adat terhadap masa depan.
4. Kebijakan pemerintah daerah: rencana pemanfaatan areal bekas tebangan KOPERMAS dan legalitasnya (dokumen yang sudah ada); aksi yang direncanakan/sudah dilaksanakan); alokasi sumberdaya (dana, tenaga, dll).

## Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan, wawancara dengan responden kunci (Kepala Suku, Kepala Kampung, tokoh masyarakat, agen pembangunan lokal), serta melalui diskusi kelompok terfokus atau *focused group discussion* dengan masyarakat adat.

## Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan hasilnya disajikan dalam bentuk tabel dan grafik serta dilengkapi dengan gambar atau foto.

# Hasil dan Pembahasan

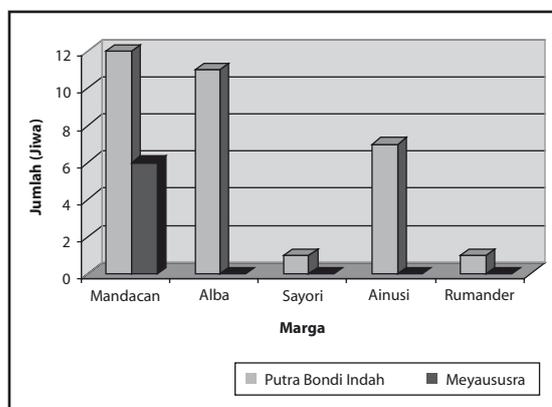
## Profil Masyarakat Adat

### Sistem Kekerabatan

Areal konsesi KOPERMAS Putra Bondi Indah (PBI) merupakan hak adat dari lima marga, sedangkan areal konsesi KOPERMAS Meyaususra merupakan hak adat dari satu marga. Marga-marga tersebut seluruhnya adalah anggota Suku Besar Arfak yang merupakan penduduk asli yang mendiami wilayah Kepala Burung Papua terutama di Pegunungan Arfak, Kabupaten Manokwari, dan merupakan salah satu suku terbesar di Provinsi Irian Jaya Barat.

Berdasarkan kontrak kerja antara KOPERMAS dan mitra kerja dengan masyarakat adat, direncanakan KOPERMAS PBI akan menebang kawasan hutan milik 32 kepala keluarga dari 5 marga, sedang KOPERMAS Meyaususra akan menebang hutan milik 6 kepala keluarga yang seluruhnya berasal dari Marga Mandacan (Gambar 2).

Sistem kekerabatan yang dianut oleh Suku Besar Arfak dalam hal pewarisan tanah, sumberdaya alam dan pengambilan keputusan untuk pengelolaannya adalah sistem patrilineal.



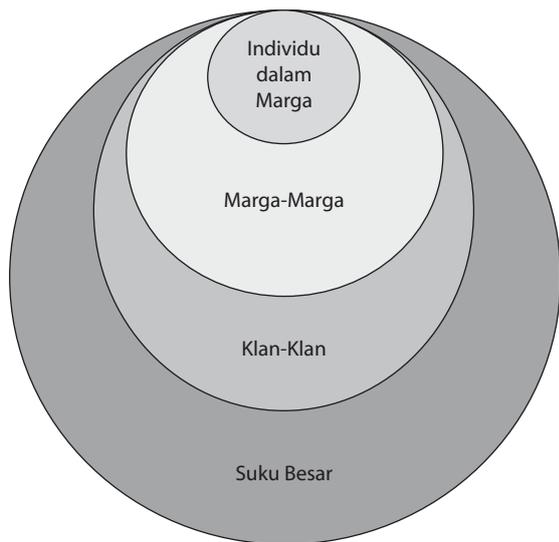
Gambar 2. Komposisi marga pemilik hak adat KOPERMAS Putra Bondi Indah dan Meyaususra

Kepemilikan hak ulayat atas tanah dan hutan dikuasai oleh kepala suku maupun kepala klan yang kemudian membaginya kepada masyarakat adatnya (anggota suku/klan) dengan luasan-luasan tertentu untuk tiap marga. Ketua marga kemudian akan menentukan wilayah-wilayah tanah adat untuk setiap keluarga anggota marganya untuk dimanfaatkan bagi pemenuhan kebutuhan hidupnya. Laksono *et al.* (2001) lebih jauh menjelaskan bahwa batas-batas kepemilikan dan penguasaan lahan ditentukan berdasarkan kesepakatan di antara mereka dengan menggunakan batas-batas alam. Setelah batas-batas alam tersebut disepakati mereka akan menghormatinya melalui tatanan adat yang disebut dengan “*Igya Ser Hanjop*” (Bahasa Hatam), yang berarti “*mari kita jaga batas*”.

### Pola Kepemilikan dan Penguasaan Lahan Adat

Pola kepemilikan dan penguasaan lahan termasuk tanah, hutan dan perairan adalah sistem pewarisan yang menganut pola patrilineal. Hak kepemilikan dan penguasaan suatu wilayah adat diwariskan kepada anak laki-laki tertua yang nantinya akan menjadi ketua marga bersangkutan. Ketua marga ini yang akan mengatur pembagian dan pemanfaatan lahan dan sumberdaya alam yang tersedia untuk keperluan hidupnya, terutama untuk kegiatan meramu (ekstraksi sumberdaya alam) maupun pemanfaatan untuk kegiatan perladangan. Pola kepemilikan dan penguasaan sumberdaya lahan adat Suku Arfak digambarkan seperti pada Gambar 3.

Berdasarkan nilai adat yang dianut oleh masyarakat Suku Besar Arfak, tanah ataupun hutan memiliki nilai sosial, nilai ekonomi dan nilai budaya yang sangat dijunjung tinggi. Mereka secara adat beranggapan bahwa tanah dan hutan



Gambar 3. Pola pemilikan dan penguasaan sumberdaya Suku Besar Arfak

bagaikan “ibu kandung” yang dapat memberi makan anak-anaknya. Berdasarkan nilai adat tersebut, tanah tidak dapat diperjualbelikan. Jika mereka menjualnya sama halnya dengan menjual ibu kandungnya. Demikian pula dengan hutan, orang luar tidak boleh dengan sembarangan masuk untuk merusak hutan tanpa seizin kepala suku atau kepala marga, mereka akan marah karena menganggap datang membunuh ibu kandung mereka.

Seiring dengan proses pembangunan dan terjadinya interaksi sosial antara masyarakat setempat dengan masyarakat luar, terutama para investor, nilai adat sudah mulai terdegradasi. Mereka, bahkan, telah memperjualbelikan tanahnya untuk sekedar mendapatkan uang tunai yang besar. Diketahui bahwa telah terjadi pergeseran pandangan dari ekonomi subsisten ke ekonomi uang (P3FED-NRM III, 2004).

Pergeseran nilai adat juga telah terjadi pada kekuasaan kepala suku besar. Jika awalnya yang mengatur kepemilikan dan penguasaan atas tanah adat dan sumberdaya alam dalam wilayah adatnya adalah kepala suku, kini telah bergeser ke ketua marga. Akibatnya, pihak ketiga yang akan memanfaatkan hutan dalam wilayah adat kelompok marga tertentu cukup berunding dengan ketua dan anggota marga bersangkutan, tanpa melibatkan kepala suku. Konsekuensinya, jika terjadi klaim dari marga lain atas kompensasi penggunaan wilayah adat marga tertentu, seringkali terjadi konflik sosial yang menjurus pada perang antar marga, sekalipun mereka berada dalam satu suku. Bila

tidak terselesaikan dengan baik, sering terjadi kelompok marga lain tersebut akan menuntut pihak ketiga yang memanfaatkan wilayah adat tadi untuk mengganti kerugian (memberikan kompensasi) kepada mereka. Jika tidak dipenuhi tuntutan mereka, maka mereka akan melakukan tindakan apapun sampai tuntutan mereka dipenuhi.

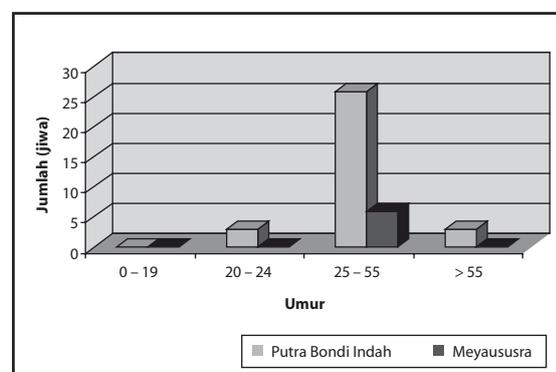
Demikian pula halnya apabila dalam kelompok marga bersangkutan ada yang merasa pemilik hak atas tanah, tetapi tidak termasuk yang menerima hasil kompensasi atas penggunaan tanah/hutan, maka ia akan menuntut pihak pengguna tanah/hutan tersebut, dan bukan menuntut ketua marganya. Jika tuntutannya tidak terpenuhi maka dia akan mengajak anggota keluarganya untuk melakukan tindakan pengrusakan agar tuntutannya terpenuhi. Kondisi inilah yang selama ini terjadi, baik pada penggunaan tanah adat oleh pemerintah maupun investor, seperti yang dialami oleh pengusaha yang bermitra dengan KOPERMAS.

### Sosial Ekonomi Pemilik Lahan Adat

#### Umur

Gambaran mengenai pemilik hak adat atas areal konsesi KOPERMAS Putra Bondi Indah dan KOPERMAS Meyaususra menurut umur disajikan pada Gambar 4.

Gambar 4 menunjukkan bahwa pemilik adat pada kedua KOPERMAS seluruhnya tergolong dalam usia produktif, kecuali sebagian kecil yakni sekitar 9,4% pemilik pada KOPERMAS Putra Bondi Indah yang tergolong usia lanjut. Berdasarkan umur, masyarakat pemilik ulayat pada kedua KOPERMAS sebenarnya cukup potensial untuk dilibatkan dan diberdayakan dalam kegiatan pengelolaan sumberdaya alam

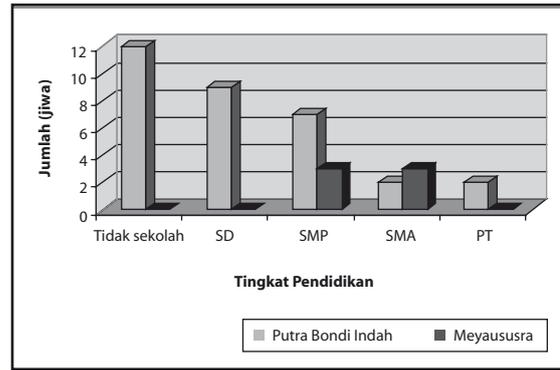


Gambar 4. Pemilik hak adat areal konsesi KOPERMAS Putra Bondi Indah dan Meyaususra menurut umur

mereka. Umumnya masyarakat pada kelompok usia produktif masih mampu menerima inovasi baru dalam meningkatkan produksi dari kegiatan produktif yang dilakukan maupun dalam meningkatkan kapasitas dirinya.

### Tingkat Pendidikan

Distribusi pemilik hak ulayat pada KOPERMAS Putra Bondi Indah dan KOPERMAS Meyaususra menurut tingkat pendidikan disajikan pada Gambar 5.



Gambar 5. Pemilik hak adat areal konsesi KOPERMAS Putra Bondi Indah dan Meyaususra menurut tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan pemilik lahan adat pada kedua KOPERMAS bervariasi dari yang tidak bersekolah sampai yang menempuh perguruan tinggi. Tingkat pendidikan mempunyai pengaruh terhadap pola pikir dalam pengambilan keputusan dan proses adopsi dari suatu inovasi baru yang diterima. Dengan memperhatikan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat pemilik hak adat KOPERMAS, khususnya Putra Bondi Indah, sangat mungkin dilakukan penyuluhan dengan pendekatan pendampingan dalam rangka peningkatan partisipasi mereka dalam pengelolaan sumberdaya untuk meningkatkan taraf hidup. Sampai saat ini partisipasi mereka dalam setiap kegiatan pengelolaan ulayatnya dengan pihak ketiga masih terbatas pada partisipasi karena dorongan, belum sampai pada tingkat partisipasi karena kesadaran sendiri (partisipasi spontan).

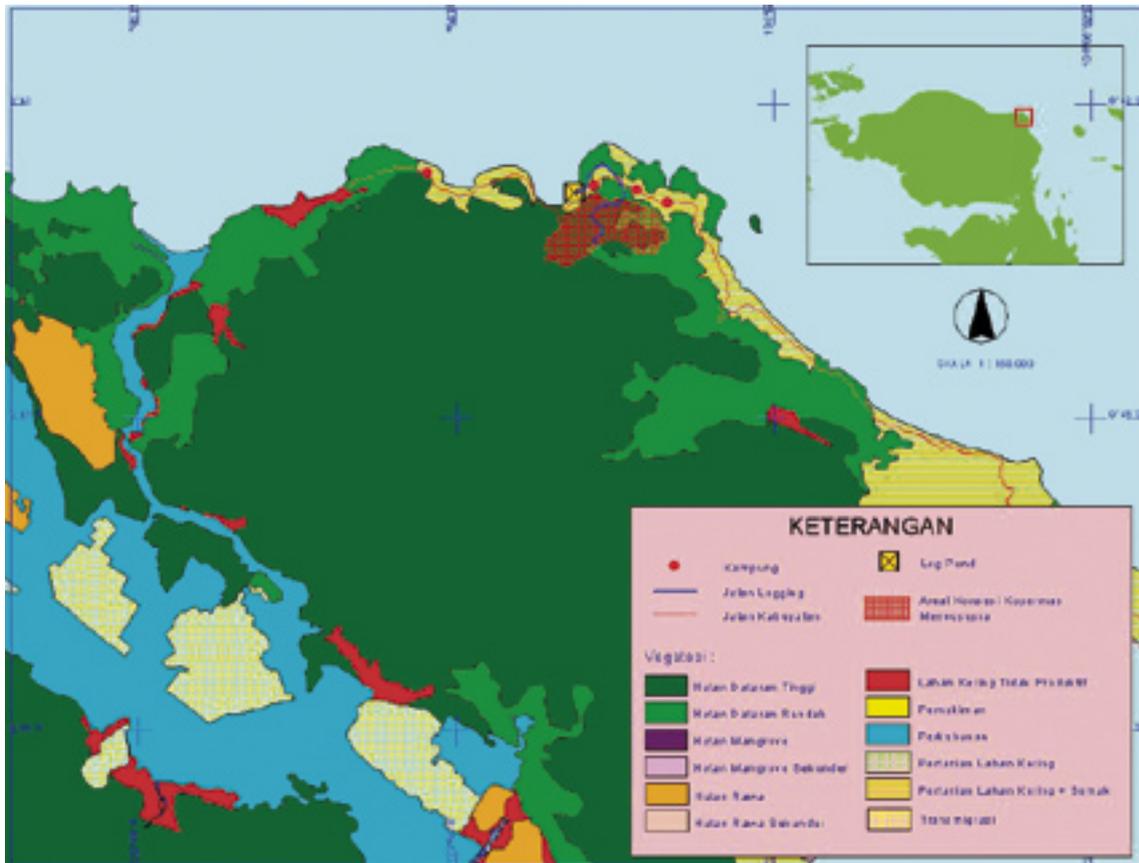
### Domisili

Distribusi pemilik hak adat pada KOPERMAS Putra Bondi Indah dan KOPERMAS Meyaususra menurut

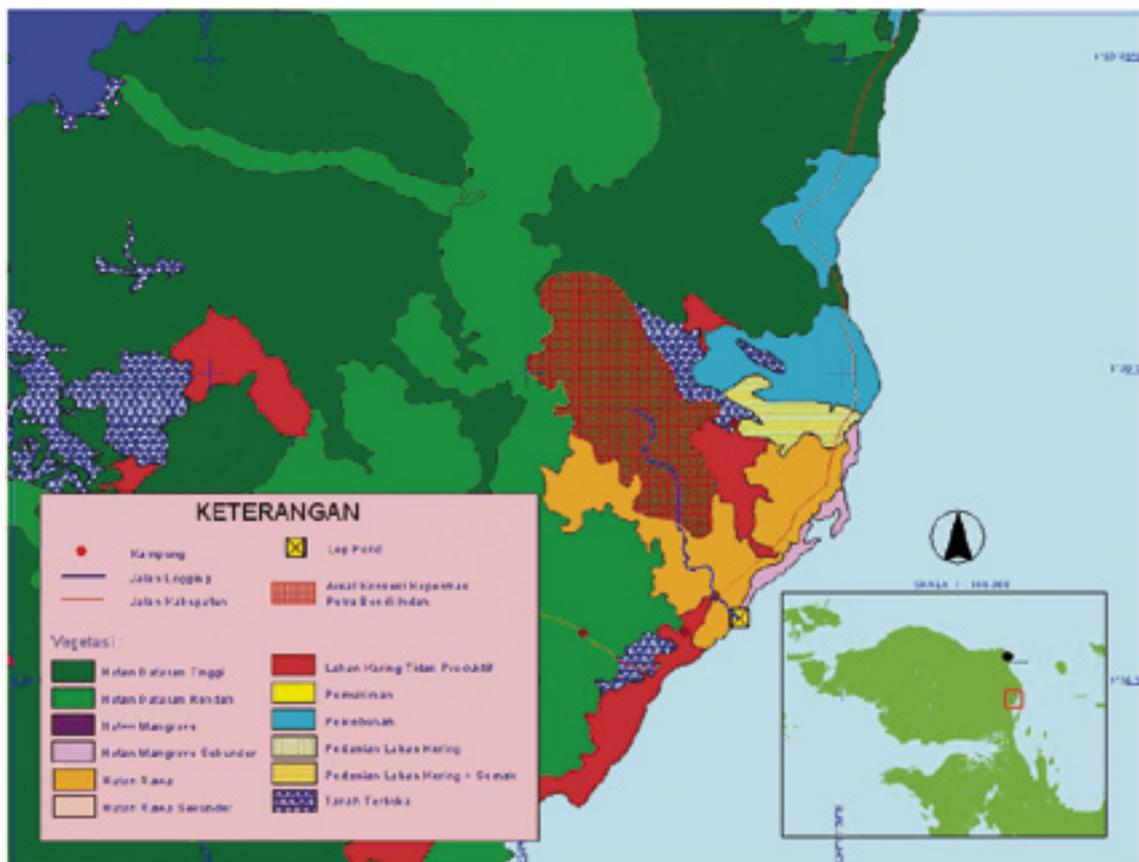
domisili dan jarak terhadap areal konsesi KOPERMAS disajikan pada Tabel 1. Lokasi areal bekas tebangan KOPERMAS relatif jauh dari lokasi pemukiman, berkisar antara 5 sampai 32 km. Relatif jauhnya jarak areal bekas tebangan dengan pemukiman dan rendahnya aksesibilitas kawasan (khususnya untuk mencapai areal bekas tebangan sebelum dilakukan eksploitasi oleh KOPERMAS) menyebabkan areal tersebut belum terjangkau oleh aktivitas masyarakat (Gambar 6 dan Gambar 7). Kawasan tersebut hanya dimanfaatkan sebagai tempat berburu dan meramu (mengambil pucuk dan buah melinjo atau buah merah). Adanya prasarana angkutan yang dibangun oleh KOPERMAS untuk mengeluarkan kayu (jalan logging) mendorong sebagian masyarakat untuk mulai membuka areal di sepanjang sisi jalan, terutama dekat pemukiman mereka. Areal tersebut ditanami tanaman bahan makanan dan di beberapa

Tabel 1. Distribusi pemilik hak adat pada KOPERMAS Putra Bondi Indah dan KOPERMAS Meyaususra menurut kampung asal (tempat tinggal)

No	Kampung Asal	Jarak dari Areal Konsesi (Km)	Jumlah (KK)	Nisbah (%)
<b>KOPERMAS Putra Bondi Indah</b>				
1.	Hamawi	7	12	37,5
2.	Bamaha	8	1	3,1
3.	Momi	5	1	3,1
4.	Tobouw	5	11	34,4
5.	Sabri	8	5	15,6
6.	Mars Maras	10	2	6,3
Jumlah			32	100,0
<b>KOPERMAS Meyaususra</b>				
1.	Amban	32	3	50,0
2.	Nuni	8	1	16,7
3.	Asai	5	2	33,3
Jumlah			6	100,0



Gambar 6. Sebaran pemukiman dan ladang terhadap areal konsesi KOPERMAS Meyausura, Distrik Manokwari, Manokwari (Sumber: Hasil interpretasi Citra Landsat tahun 2000 dan observasi lapangan)



Gambar 7. Sebaran pemukiman dan ladang terhadap areal konsesi KOPERMAS Putra Bondi Indah, Distrik Ransiki, Manokwari (Sumber: Hasil interpretasi Citra Landsat tahun 2000 dan observasi lapangan)

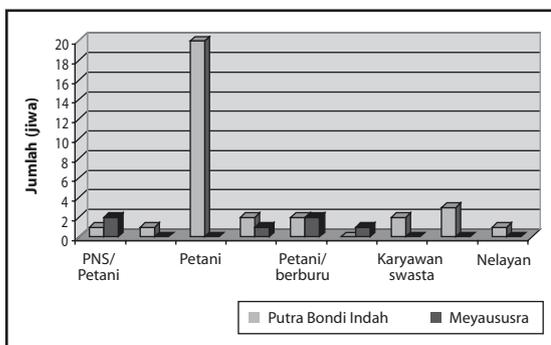
bagian dibangun kebun kakao. Kondisi ini bersifat alamiah bagi masyarakat tradisional. Di wilayah-wilayah yang aksesibilitasnya tinggi, pemanfaatan areal cenderung akan lebih intensif dibandingkan di wilayah dengan aksesibilitas yang rendah. Hal ini terkait dengan kemampuan masyarakat untuk membuka lahan.

**Sumber dan Tingkat Pendapatan Keluarga**

Distribusi pemilik hak adat areal konsesi KOPERMAS Putra Bondi Indah dan KOPERMAS Meyaesusra menurut mata pencaharian disajikan pada Gambar 8.

Gambar 8 menunjukkan bahwa sebagian besar yakni sekitar 20 KK atau 62,59% dari pemilik adat areal KOPERMAS Putra Bondi Indah bermatapencaharian sebagai petani, dan sisanya meskipun mata pencaharian utamanya bukan petani, bertani menjadi pekerjaan sampingan. Pemilik adat areal KOPERMAS Meyaesusra sebagian besar (66,67%) bermatapencaharian sebagai petani, sedangkan sisanya sebagai pegawai negeri sipil (bagi pemilik adat istri). Kondisi ini terjadi akibat perkawinan masuk antar marga dalam satu suku besar, yang sebenarnya terdiri dari sub-sub suku (kelompok klan dalam satu moyang). Kesimpulan yang diambil tentang subyek hak atas sumberdaya alam bisa menyesatkan dan bias apabila pendataan dilakukan tidak secara hati-hati, dan menganggap marga kepala keluarga sebagai pewaris hak adat atas sumberdaya alam. Anggapan bahwa pemilik wilayah adat terdiri dari beberapa marga sebenarnya keliru. Wilayah adat hanya dimiliki oleh satu marga saja. Kesalahan anggapan ini terkadang menjadi sumber konflik dalam pemanfaatan wilayah adat oleh pihak ketiga.

Pola pertanian yang dianut masyarakat adat umumnya adalah perladangan berpindah dalam



Gambar 8. Pemilik hak adat areal konsesi KOPERMAS Putra Bondi Indah dan KOPERMAS Meyaesusra menurut mata pencaharian

skala subsisten. Selain bertani, masyarakat juga memelihara hewan yang dilakukan secara ekstensif. Hewan peliharaan jarang dikandangkan, tetapi dilepas di pekarangan dan di ladang. Kepemilikan hewan peliharaan khususnya hewan ruminansia (sapi dan kambing) merupakan bantuan dari pemerintah atau donatur lain dalam program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup. Sedangkan ternak ayam umumnya ayam bukan ras (ayam kampung). Ternak ayam dan babi secara tradisi telah dipelihara turun-temurun dan dapat digolongkan sebagai hewan kesenangan, dan jarang dikomersialkan.

Penjualan hewan peliharaan hanya dilakukan apabila keluarga benar-benar membutuhkan uang tunai untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Anjing, juga merupakan hewan kesayangan. Hampir semua masyarakat memelihara jenis hewan ini untuk tujuan berburu satwa liar di hutan, selain sebagai penjaga rumah. Ternak babi memiliki nilai sosial dan nilai budaya yang tinggi bagi masyarakat Suku Arfak pada umumnya. Jumlah ternak babi yang dimiliki seseorang menjadi ukuran status sosial orang bersangkutan di masyarakatnya. Semakin



Gambar 9. Hewan yang umum dipelihara masyarakat adat



Gambar 10. Tanaman Kakao yang telah dibudidayakan Masyarakat dan merupakan komoditas unggulan

banyak jumlah babi yang dimiliki, semakin tinggi status sosial seseorang. Seorang kepala suku memiliki jumlah babi peliharaan lebih banyak dibanding ketua marga. Ketua marga memiliki jumlah babi peliharaan lebih banyak dari warga masyarakat biasa. Jumlah babi peliharaan yang dimiliki seseorang menjadi indikator bahwa orang bersangkutan dapat berpoligami.

Ditinjau dari aspek budaya, babi peliharaan digunakan sebagai mas kawin dan sebagai alat pembayaran denda adat. Bahkan bagi masyarakat Suku Arfak, babi peliharaan telah dianggap sebagai bagian dari keluarganya. Indikatornya adalah sering dijumpai seorang ibu menggondong anak babi saat ke ladang atau ke pasar. Bahkan hewan tersebut sering disusui. Babi yang telah dewasa pun dapat mengikuti tuannya kemanapun tuannya pergi, seperti layaknya anjing. Dari segi pemeliharaan, babi peliharaan hanya dilepas di pekarangan atau di lahan bekas ladang. Akibatnya tidak jarang, babi peliharaan ini menjadi sumber konflik masyarakat Suku Besar Arfak, baik antar anggota suku maupun dengan pihak lain. Hal ini terjadi apabila ternak babi seseorang dibunuh karena merusak ladang orang lain atau tertabrak kendaraan. Biasanya tuntutan ganti rugi yang diminta sangat mahal, dapat mencapai jutaan rupiah. Dalam tuntutan mereka memperhitungkan seluruh biaya yang pernah dikeluarkan. Bahkan, jika babi yang mati tersebut berjenis kelamin betina, mereka memperhitungkan jumlah anak babi yang pernah dilahirkan. Jenis hewan peliharaan masyarakat adat pada kedua KOPERMAS disajikan pada Tabel 3.

Jenis komoditas pertanian yang dibudidayakan masyarakat adat pada kedua KOPERMAS disajikan pada Tabel 2.

Pendapatan keluarga dari berbagai sumber kehidupan tersebut pada KOPERMAS Putra Bondi Indah berkisar dari Rp. 1.095.000 sampai Rp. 12.355.000 per tahun, dengan rata-rata Rp. 3.058.406 per tahun (setara dengan Rp. 91.250 - Rp. 1.029.583/KK/bulan, dengan rata-rata Rp. 254.867/KK/bulan). Pada KOPERMAS Meyaesusra pendapatan cukup bervariasi, tergantung pada sumber pendapatan utama dan sampingan. Angkanya berkisar antara Rp. 1.741.000 dan Rp. 22.598.000 per tahun, dengan rata-rata Rp. 10.491.167 per tahun (setara dengan Rp. 145.083 - Rp. 1.883.167 per tahun dengan rata-rata Rp. 437.132/KK/bulan).

Kontribusi usaha tani (pertanian dan

peternakan) terhadap pendapatan total keluarga masyarakat adat bervariasi mulai dari 11% sampai 100% pada KOPERMAS Meyaesusra dan 18% sampai 100% pada KOPERMAS Putra Bondi Indah. Hal ini tergantung pada intensitas dan komoditas yang diusahakan pada kegiatan usaha tani. Masyarakat adat yang memiliki mata pencaharian sebagai PNS atau karyawan perkebunan serta usaha produktif lain (angkutan pedesaan) memiliki pendapatan lebih tinggi dibandingkan dengan pemilik ulayat yang mata pencaharian hanya sebagai petani.

Variasi kontribusi sektor usaha tani terhadap pendapatan keluarga selain dipengaruhi oleh perbedaan jenis mata pencaharian, juga disebabkan oleh tempat domisili masyarakat pemilik hak adat. Masyarakat pemilik hak adat areal konsesi KOPERMAS Meyaesusra seluruhnya berdomisili di pinggiran Kota Manokwari, yang merupakan ibukota kabupaten, sehingga memiliki peluang yang lebih besar untuk langsung memasarkan hasil produksinya ke konsumen akhir (tanpa perantara). Mereka dapat menjualnya dengan harga yang relatif lebih tinggi dibanding masyarakat pemilik hak adat areal konsesi KOPERMAS Putra Bondi Indah.

#### *Alokasi Pendapatan Keluarga*

Pola usaha tani masyarakat adat pada KOPERMAS Putra Bondi Indah dan KOPERMAS Meyaesusra bersifat subsisten. Sebagian besar pendapatan maupun hasil usaha tani yang diperoleh habis dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan primer keluarga, baik dikonsumsi langsung maupun dijual terlebih dahulu dan hasilnya digunakan untuk membeli berbagai kebutuhan yang tidak dapat diproduksi sendiri (minyak tanah, minyak goreng, beras, gula, sabun, dll). Biaya pendidikan dan kebutuhan sekunder lain umumnya dipenuhi dari hasil penjualan kakao dan sumber-sumber pendapatan lainnya (upah, gaji).

Subsistensi usaha tani dengan alur usaha dan pendapatannya serta nilai-nilai adat yang berlaku di masyarakat diduga merupakan kombinasi berbagai faktor yang berpengaruh terhadap pola pengalokasian pendapatan keluarga yang diperoleh. Sebagai contoh, seperti yang dilaporkan oleh salah seorang narasumber wawancara, setiap KK memperoleh uang kompensasi produksi dari KOPERMAS atas hasil kayu yang diambil dari lahan adat mereka. Rata-rata total uang tunai yang diterima adalah Rp. 12.529.000/KK (KOPERMAS Putra Bondi Indah)

**Tabel 2.** Tanaman budidaya masyarakat adat pemilik areal konsesi KOPERMAS Putra Bondi Indah dan KOPERMAS Meyaususra

No	Komoditas	Keluarga Pemilik (KK)		Luas Lahan (Ha/KK)		Keterangan
		Jumlah	Proporsi(%)	Kisaran	Rataan	
<b>KOPERMAS Putra Bondi Indah</b>						
<b>I. Tanaman Tahunan</b>						
1.	Kakao	32	100	0,5 – 2,0	1,0	-
2.	Buah Merah	1	3,125	-	-	sporadis
3.	Pisang	32	100	0,1 - 0,5	0,2	-
4.	Sagu	1	3,125	-	-	baru ditanam
<b>II. Tanaman Semusim<sup>*)</sup></b>						
1.	Kacang panjang	32	100	0,2 - 0,5	0,3	sesuai kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja dalam keluarga
2.	Tomat	32	100	0,2 - 0,5	0,3	
3.	Ketela pohon	32	100	0,2 - 0,5	0,3	
4.	Ubi jalar	32	100	0,2 - 0,5	0,3	
5.	Keladi	32	100	0,2 - 0,5	0,3	
6.	Jagung	32	100	0,2 - 0,5	0,3	
<b>KOPERMAS Meyaususra</b>						
<b>I. Tanaman Tahunan</b>						
1.	Kakao	6	100	1,0 – 2,0	1,0	-
2.	Pisang	6	100	0,1 – 0,5	0,2	-
3.	Mangga	3	50			Di pekarangan
4.	Rambutan	3	50			Di pekarangan
5.	Durian	1	16,67			Di pekarangan
<b>II. Tanaman Semusim<sup>*)</sup></b>						
1.	Ketimun	3	50	0,2 - 0,5	0,3	sesuai kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja dalam keluarga
2.	Tomat	3	50	0,2 - 0,5	0,3	
3.	Ketela pohon	3	50	0,2 - 0,5	0,3	
4.	Ubi jalar	3	50	0,2 - 0,5	0,3	
5.	Keladi	3	50	0,2 - 0,5	0,3	
6.	Cabe	3	50	0,2 - 0,5	0,3	

\* Tanaman semusim ditanam oleh seluruh anggota masyarakat adat pada ladang mereka secara bergiliran dalam pola perladangan berpindah

**Tabel 3.** Hewan peliharaan masyarakat adat pemilik areal konsesi KOPERMAS Putra Bondi Indah dan KOPERMAS Meyaususra

No	Jenis Ternak	Keluarga Pemilik (KK)		Kepemilikan (Ekor/KK)		Keterangan
		Jumlah	Proporsi (%)	Kisaran	Rataan	
<b>KOPERMAS Putra Bondi Indah</b>						
1.	Sapi	2	0,06	2 - 3	2	Bantuan
2.	Kambing	2	0,06	2 - 3	2	Bantuan
3.	Babi	5	0,16	1 - 5	3	Babi kampung
4.	Ayam	1	0,03	10	-	
<b>KOPERMAS Meyaususra</b>						
1.	Sapi	-	-	-	-	
2.	Kambing	-	-	-	-	
3.	Babi	6	100,00	3 - 15	5	Babi kampung
4.	Ayam	1	16,67	10	-	

dan Rp. 86.014.000/KK (KOPERMAS Meyaususra). Uang tunai tersebut sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersier, dan bukan untuk menambah modal usaha tani maupun untuk kebutuhan jangka panjang, seperti biaya pendidikan anak dan kesehatan. Secara terinci pengalokasian uang kompensasi yang diterima pemilik adat pada kedua KOPERMAS disajikan pada Tabel 4.

Data pada Tabel 4 menunjukkan kecenderungan perbedaan yang nyata dalam pengalokasian uang kompensasi oleh kedua kelompok pemilik hak adat, meskipun mereka berasal dari satu suku. Kecenderungan perbedaan yang menarik adalah bahwa masyarakat adat yang jauh dari perkotaan belum memiliki kapasitas yang memadai dalam memanfaatkan pendapatan tunai, tetapi mereka masih kuat memegang tradisi atau budaya. Mereka membagi pendapatannya kepada anggota keluarga atau famili. Kesadaran akan pentingnya pengalokasian pendapatan untuk jangka panjang, seperti untuk pendidikan anak dan kesehatan, tampaknya hanya dimiliki oleh masyarakat lokal yang telah berpendidikan atau mereka yang berstatus pegawai. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembinaan masih perlu terus dilakukan, terutama dalam pengelolaan keuangan keluarga untuk tujuan jangka panjang.

### Sarana dan Prasarana

#### Sarana Pendidikan

Untuk menunjang peningkatan pendidikan generasi muda masyarakat di sekitar areal konsesi KOPERMAS, sebenarnya sudah tersedia sarana pendidikan yang memadai. Di areal konsesi KOPERMAS Putra Bondi Indah, sudah

tersedia sebuah SMU Swadaya, sebuah SMP Negeri dan beberapa buah SD baik negeri dan swasta di kota Ransiki, ibukota kecamatan. Untuk KOPERMAS Meyaususra, karena lokasinya berdekatan dengan ibukota kabupaten dan Provinsi Irian Jaya Barat, sarana pendidikan yang tersedia jauh lebih lengkap, mulai dari SD sampai perguruan tinggi.

#### Sarana Transportasi dan Komunikasi (Aksesibilitas)

Lokasi pemukiman (kampung-kampung) pemilik hak adat areal konsesi kedua KOPERMAS relatif mudah dijangkau, baik dengan kendaraan roda dua maupun roda empat. Khusus untuk KOPERMAS Putra Bondi Indah, meskipun jarak antar kampung berjauhan tetapi kampung-kampung tersebut sudah dihubungkan dengan jalan beraspal. Demikian juga dari kampung-kampung ke ibukota kecamatan maupun ibukota kabupaten. Dari ibukota kecamatan, Ransiki, ke ibukota kabupaten Manokwari, tersedia sarana transportasi berupa angkutan pedesaan dalam jumlah dan frekuensi yang memadai. Dari ibukota kecamatan ke kampung dapat ditempuh dengan menggunakan motor ojek.

Fasilitas telepon pada kedua lokasi hanya sampai tingkat kecamatan dan belum menjangkau kampung-kampung yang berada di sekitar areal KOPERMAS. Di Ransiki, saat ini sudah tersedia fasilitas telepon yang dilayani oleh PT. TELKOM Cabang Ransiki. Di kantor TELKOM tersebut tersedia fasilitas WARTEL yang terlihat cukup ramai didatangi pengguna, baik masyarakat pendatang maupun masyarakat lokal.

#### Sarana Perekonomian

Sarana perekonomian di tingkat kampung

**Tabel 4.** Alokasi dana kompensasi hasil kayu masyarakat pemilik adat areal konsesi KOPERMAS Putra Bondi Indah dan KOPERMAS Meyaususra

No	Alokasi Dana	Putra Bondi Indah		Meyaususra*)	
		Σ KK	Nisbah (%)	Σ KK	Nisbah (%)
1.	Modal usaha (kredit mobil untuk angkudes)	1	3,1	1	33,3
2.	Ditabung	1	3,1	3	100,0
3.	Biaya pendidikan anak	4	12,5	3	100,0
4.	Perbaiki/bangun rumah	3	9,4	-	-
5.	Dibagi antara kerabat	5	15,6	3	100,0
6.	Mas kawin	2	6,3	-	-
7.	Kebutuhan tersier (beli radio, TV, VCD, motor, senapan)	20	62,5	-	-

\*) Penerima kompensasi hanya tiga KK yang ulayatnya telah dikelola oleh KOPERMAS. Beberapa keluarga mengalokasikan dananya pada lebih dari satu penggunaan.

pada kedua lokasi KOPERMAS masih sangat terbatas. Pasar tradisional dan toko yang menjual berbagai kebutuhan pokok masyarakat hanya terdapat di tingkat kecamatan. Untuk pemasaran hasil pertanian masyarakat, di Kota Ransiki terdapat sebuah pasar tradisional yang beraktivitas sepanjang hari. Khusus untuk pasar komoditas kakao, selain telah ada toko penampung di Ransiki maupun Manokwari, juga banyak pedagang pengumpul yang datang membeli langsung hasil kakao kepada petani. Masyarakat memenuhi kebutuhan hariannya dari beberapa toko yang menyediakan aneka barang. Di Ransiki, belum ada toko yang menyediakan sarana produksi pertanian (Saprodi) seperti benih, pupuk, dan pestisida. Belum adanya kios Saprodi mungkin disebabkan karena sangat kecilnya volume pembelian sarana produksi pertanian. Penggunaan Saprodi oleh petani setempat tampaknya belum membudidaya. Di sisi lain, tingginya ketergantungan masyarakat terhadap program bantuan dari pemerintah merupakan faktor yang turut berperan. Bila bantuan pemerintah tidak ada, sebagian petani yang merasa membutuhkan sarana produksi pertanian akan membelinya ke kota Manokwari. Namun, hal ini jarang sekali dijumpai khususnya pada anggota kedua KOPERMAS yang diteliti.

Fasilitas perbankan pada kedua lokasi KOPERMAS telah tersedia di tingkat kecamatan. Di Ransiki, telah tersedia dua unit bank yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Pembangunan Daerah Papua (BPD Papua). Sedangkan masyarakat pemilik ulayat KOPERMAS Meyaususra yang lokasinya berdekatan dengan ibukota kabupaten maupun provinsi, fasilitas perbankan yang tersedia lebih memadai. Selain kedua bank



**Gambar 11.** Salah satu perubahan gaya hidup masyarakat sebagai akibat adanya KOPERMAS adalah menabung sebagian pendapatannya di Bank sebagai cadangan kebutuhan darurat

tersebut, terdapat Bank Danamon, Bank Mandiri dan Bank Negara Indonesia (BNI). Pada umumnya, masyarakat adat belum memanfaatkan jasa perbankan untuk meningkatkan kapasitas usaha taninya. Transaksi yang umum dilakukan hanya terbatas pada penyimpanan uang (tabungan).

## Kondisi Areal Bekas Tebangan

### *Tanah dan Topografi*

Tanah pada kawasan hutan areal konsesi KOPERMAS Putra Bondi Indah adalah podsolik merah-kuning dengan tekstur lempung berpasir. Topografi areal bekas tebangan bergelombang dengan kelerengan yang semakin tinggi ke arah selatan. Pada beberapa bagian terdapat lereng-lereng yang curam dengan tingkat kelerengan mencapai 30 - 50%. Areal bekas tebangan KOPERMAS Meyaususra masih menyebar di kiri kanan jalan angkutan kayu yang dibuat menuju lokasi blok tebangan. Topografi kawasan hutan bergelombang dengan kelerengan yang semakin tinggi ke arah Selatan. Pada beberapa bagian terdapat lereng-lereng yang curam dengan tingkat kelerengan mencapai 20 - 50%.

### *Potensi Pohon Komersil*

Sampai dengan berakhirnya kegiatan penebangan hutan oleh mitra kerja KOPERMAS pada tahun 2004, luas areal bekas tebangan KOPERMAS Putra Bondi Indah mencapai 15.000 hektar. Sedangkan pada KOPERMAS Meyaususra, seluruh hasil produksi merupakan hasil "*tebang matahari*" kiri kanan jalan angkutan yang terbentang mulai dari lokasi Tempat Penimbunan Kayu (TPK) atau *Logpond* di Kampung Asai II Kecamatan Manokwari Utara sampai ke lokasi penebangan.



**Gambar 12.** Kondisi tegakan areal bekas tebangan KOPERMAS yang relatif masih baik, karena hanya sedikit yang ditebang

Jenis komersil yang ditebang pada KOPERMAS Putra Bondi Indah sebagian besar adalah dari jenis merbau (*Intsia* sp.). Sedangkan pada KOPERMAS Meyaususra, kelompok jenis rimba campuran (*Palaquium* sp., *Myristica* sp., *Koordersiodendron pinnatum*, dll).

Pada saat penelitian dilaksanakan, kondisi areal bekas tebangan KOPERMAS Putra Bondi Indah masih relatif tertutup rapat oleh berbagai jenis pohon yang didominasi oleh jenis rimba campuran (*Palaquium* sp., *Myristica* sp., *Koordersiodendron pinnatum*, dll). Demikian juga kondisi hutan yang ada di kiri-kanan jalan angkutan KOPERMAS Meyaususra masih cukup rapat. Terdapat beberapa bagian yang kondisinya terbuka, yaitu pada areal yang dimanfaatkan sebagai Tempat Pengumpulan Kayu Sementara (TPn), yang telah ditumbuhi dengan rumput-rumputan dan jenis-jenis pohon pioner seperti kayu pulai (*Alstonia scholaris*), *Macaranga* spp. dan sirih hutan (*Piper aduncum*). Masih rapatnya tutupan tajuk pada areal bekas tebangan ke dua KOPERMAS tersebut disebabkan karena hanya jenis kayu komersial saja yang ditebang, yakni jenis merbau (*Intsia bijuga*).

Secara terinci potensi tegakan tingkat pohon dan tiang areal bekas tebangan pada kedua KOPERMAS disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5 menunjukkan bahwa sebenarnya bekas tebangan areal konsesi kedua KOPERMAS memiliki potensi pohon komersil yang memadai untuk ditebang. Berdasarkan SK. Menteri Kehutanan No. 8171/Kpts-II/2002 tentang Kriteria Potensi Hutan Alam Pada Hutan Produksi, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kayu (IUPHHK) pada hutan alam Papua dapat diberikan apabila kerapatan pohon diameter 10 - 19 cm sebanyak 108 pohon/ha, diameter 20-49 sebanyak 39 pohon/ha, dan diameter 50 cm ke atas sebanyak 14 pohon/ha. Potensi pohon komersil pada areal bekas tebangan kedua KOPERMAS masih cukup memadai. Kondisi ini dimungkinkan terjadi karena hanya jenis merbau (*Intsia* spp.) saja yang diproduksi oleh mitra kerja. Jenis pohon dari golongan meranti dan rimba campuran sangat sedikit yang ditebang.

Dengan kondisi tersebut, areal bekas KOPERMAS sebenarnya dapat diusahakan sendiri oleh masyarakat pemilik adat dengan teknologi dan skala perusahaan yang sesuai

**Tabel 5.** Potensi pohon komersial areal bekas tebangan KOPERMAS Putra Bondi Indah dan KOPERMAS Meyaususra

No	Jenis	Kerapatan (Pohon/Ha)		
		Masak Tebang	Pohon	Tiang
<b>Putra Bondi Indah</b>				
1.	<i>Pometia</i> spp.	15	20	45
2.	<i>Palaquium</i> sp.	12	14	25
3.	<i>Alstonia sholaris</i>	9	10	12
4.	<i>Koordersiodendron</i> sp.	8	16	40
5.	<i>Intsia</i> sp.	6	15	20
6.	<i>Terminalia cattapa</i>	3	3	10
7.	<i>Octomeles sumatrana</i>	3	-	-
8.	<i>Zisigium</i> spp.	-	12	15
9.	<i>Homonoya javensis</i>	-	-	25
	Jumlah	56	90	192
<b>Meyaususra</b>				
1.	Rimba Campuran	25	70	420
2.	<i>Pometia</i> spp.	5	35	20
3.	<i>Octomeles sumatrana</i>	-	10	-
4.	<i>Koordersiodendron</i> sp.	5	0	-
5.	<i>Palaquium</i> sp.	-	5	-
	Jumlah	35	120	440

Keterangan :

- a) Masak Tebang = Diameter lebih dari 50 cm
- b) Pohon = Diameter antara 20 – 49 cm
- c) Tiang = Diameter antara 10 – 19 cm.

dengan kapasitas masyarakat setempat dan dengan dukungan usaha penggergajian rakyat (*Portable Sawmill*). Hal ini dapat memberikan sumbangan yang besar terhadap pendapatan keluarga secara lebih berkelanjutan dengan jangka waktu usaha yang lebih panjang. Fakta lapangan menunjukkan bahwa sekalipun kegiatan KOPERMAS telah ditutup, namun di kedua areal konsesi masih dijumpai kegiatan penebangan dan penggergajian untuk produksi kayu gergajian dengan menggunakan gergaji rantai (*chainsaw*). Penggunaan alat *chainsaw* sangat merugikan, karena selain terjadi pemborosan kayu, kualitas kayu gergajian yang dihasilkan juga sangat rendah.

### **Tumbuhan dan Hewan Liar**

Secara tradisional, hutan memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat pemilik hak adat pada kedua lokasi KOPERMAS. Hal ini dikarenakan hampir seluruh kehidupan mereka sangat tergantung pada hutan. Masyarakat setempat pada umumnya adalah petani kecil yang melakukan kegiatan meramu dan perladangan berpindah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hutan juga merupakan sumber pengambilan kayu bakar, kayu bangunan dan obat-obatan tradisional. Beberapa jenis tumbuhan yang tumbuh di hutan dan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan pangan adalah melinjo (*Gnetum gnemon*), bambu (*Bambusa spp*) dan sayuran-sayuran, buah-buahan seperti matoa (*Pometia pinnata*), rambutan (*Nephelium sp.*), langsung (*Lansium sp.*), buah merah (*Pandanus conoideus*) dan lain-lain. Pada areal bekas tebangan KOPERMAS Putra Bondi Indah, selain buah merah tidak dijumpai jenis tumbuhan penghasil hasil hutan bukan kayu yang lazim dimanfaatkan oleh masyarakat atau potensial untuk dikembangkan seperti kayu lawang (*Cinamomum sp*) dan massoi (*Cryptocaria sp*) yang banyak dijumpai pada hutan alam di daerah kepala burung Papua.

Buah merah tumbuh berkelompok dalam rumpun-rumpun kecil secara sporadis pada daerah-daerah lembab seperti tepi mata air atau tepi sungai. Tumbuhan ini, tumbuh soliter pada daerah-daerah terbuka yang kondisi tanahnya lembab dan air tanah dangkal. Buah merah telah dimanfaatkan oleh masyarakat adat sebagai bahan makanan terutama sebagai penyedap. Bagian tumbuhan yang dimanfaatkan adalah buah masak yang dipanen pada periode

waktu tertentu untuk tujuan subsisten maupun untuk dijual sekedar mendapatkan uang tunai.

Di areal KOPERMAS Meyaususra, informasi yang diperoleh dari masyarakat terdapat potensi hasil hutan non kayu seperti rotan (*Calamus spp.*). Namun, saat penelitian dilakukan jenis tersebut tidak dijumpai di areal bekas tebangan. Diduga potensi rotan rendah dan pertumbuhannya tidak merata dalam kawasan hutan. Pemanfaatan rotan oleh masih masyarakat masih terbatas hanya sebagai bahan pengikat dan sebagai tali jemuran pakaian. Pada areal konsesi KOPERMAS Meyaususra, ditemukan jenis buah merah yang tumbuh berkelompok pada daerah-daerah lembab seperti tepi mata air, rawa temporer dan tepi sungai pada tanah-tanah alluvial muda dengan tekstur lempung berpasir. Saat ini, buah merah telah menjadi sumber pendapatan tunai yang cukup potensial bagi masyarakat. Harga buah merah segar baik di kampung Nuni, Kecamatan Ransiki maupun di pasar tradisional kota Manokwari tidak berbeda, yakni berkisar antara Rp 25.000 sampai Rp 100.000 per buah. Sedangkan hasil minyak buah merah hasil ekstraksi tradisional oleh masyarakat, harganya berkisar Rp 250.000/botol (600 ml). Melalui ekstraksi dengan pengolahan lebih baik (minyak lebih murni), hasil minyak dihargai lebih tinggi, yakni Rp. 150.000/100 ml.

Di samping memanfaatkan tumbuhan, masyarakat juga melakukan perburuan hewan dalam kawasan hutan, baik untuk konsumsi sendiri maupun untuk dijual. Satwa yang umum diburu adalah babi hutan (*Sus scrofa*), rusa (*Cervus timorensis*) dan beberapa jenis kelompok burung (*Aves*). Berburu merupakan kegiatan sampingan bagi sebagian masyarakat adat, terutama apabila mereka membutuhkan



Gambar 13. Jenis Pandan penghasil Buah Merah yang banyak tumbuh di hutan ulayat dapat menjadi sarana peningkatan perekonomian masyarakat adat

uang tunai untuk berbagai keperluan. Pada saat KOPERMAS beroperasi, kegiatan berburu tidak dilakukan. Selain mereka sudah mendapatkan uang tunai hasil kompensasi dari KOPERMAS, hewan buruan juga sulit ditangkap. Kegiatan penebangan hutan menyebabkan satwa hutan pindah ke daerah lain yang relatif masih belum terganggu.

### Pemanfaatan Areal Bekas Tebangan

Lokasi areal bekas tebangan KOPERMAS Putra Bondi Indah dan Meyaususra berada relatif jauh dari pemukiman pemilik ulayatnya (kurang lebih berjarak 10 km dari perkampungan). Aksesibilitasnya juga rendah. Jauhnya jarak pemukiman dengan areal bekas tebangan dan masih banyaknya jenis pohon yang masih dalam masa pertumbuhan menyebabkan areal bekas tebangan KOPERMAS tersebut relatif tidak dimanfaatkan oleh masyarakat adat. Jalan angkutan kayu yang dibangun untuk mengeluarkan kayu telah mempermudah akses masyarakat ke areal bekas tebangan. Mereka mulai membuka lahan untuk ladang yang berada di sepanjang jalan bekas angkutan kayu (Gambar 14).



Gambar 14. Terbukanya akses melalui jalan *logging* telah memotivasi masyarakat membuka lahan pertanian di sepanjang kiri-kanan jalan



Gambar 15. Tumpukan kayu gergajian yang diolah dari areal bekas tebangan KOPERMAS

Bentuk pemanfaatan areal bekas tebangan yang saat ini dilakukan adalah berupa penebangan pohon oleh operator *chain-saw* yang berasal dari pengusaha lokal yang bekerjasama dengan individu-individu pemilik hak adat. Bentuk kerjasama yang dilakukan adalah jual beli pohon berdiri untuk diolah menjadi kayu gergajian (seperti sortimen balok balok atau papan). Jenis yang ditebang pada areal KOPERMAS Putra Bondi Indah adalah merbau (*Intsia bijuga*). Pada areal KOPERMAS Meyaususra, yang dimanfaatkan adalah jenis pohon dari kelompok rimba campuran (*Palaquium sp.*, *Myristica sp.*, *Koordersiodendron pinnatum*, dll) (Gambar 14).

### Tata Hidup Masyarakat Adat

#### *Persepsi Masyarakat Adat terhadap Hutan*

Pada awalnya, hutan bagi masyarakat adat merupakan sumber utama penghidupan mereka. Bahkan, menurut adat hutan dianggap sebagai “*Ibu kandung*” yang memberi makan anak-anaknya (Mansoben, 2002). Hampir seluruh kebutuhan hidup masyarakat, mulai dari bahan pangan, obat-obatan dan berbagai kebutuhan hidup yang lain dipenuhi dari sumberdaya yang tersedia di hutan mereka. Seiring dengan proses pembangunan dan semakin intensifnya interaksi antara masyarakat lokal dengan masyarakat luas, nilai-nilai sosial budaya masyarakat dan cara-cara mereka memandang hutan saat ini sudah mulai luntur dan berubah. Munculnya para pemodal yang menawarkan jasa untuk mengelola hutan adat mereka telah mendorong sebagian masyarakat untuk memandang hutan sebagai sumber uang. Di sisi lain, konversi hutan menjadi lahan budidaya tanaman pertanian, terutama kakao dan berbagai tanaman semusim lainnya yang mereka jadikan sebagai sumber kebutuhan hidup dan penghasil uang tunai masih terus berlangsung. Kegiatan konversi dan berladang merupakan tradisi turun temurun masyarakat petani peramu dan peladang berpindah.

Bagi masyarakat lokal, hutan merupakan tempat berburu berbagai satwa seperti rusa, babi dan tikus tanah (*bandikut*). Sebagian kecil anggota masyarakat masih melakukan perburuan dengan frekuensi yang rendah dan hanya pada saat tertentu saja, misalnya di saat tidak ada kegiatan di ladang. Sebagian besar hasil buruan dikonsumsi sendiri dan dibagi-bagi kepada

kerabatnya. Jika hasil buruannya cukup banyak, hanya sebagian kecil yang dijual.

Bagi mayoritas anggota masyarakat adat di kedua lokasi penelitian, saat ini hutan lebih dipandang sebagai sumber pendapatan keluarga. Mereka memperoleh uang tunai dari hasil penjualan kayu-kayu yang tumbuh di dalamnya. Pandangan terhadap hutan seperti ini menjadi sangat dominan di kalangan masyarakat adat sejak gencarnya pemungutan kayu melalui IPK-MA oleh KOPERMAS.

Tawaran berupa uang tunai melalui KOPERMAS sebagai pengganti atas pohon-pohon yang ditebang di lahan hutan adat telah merubah cara pandang masyarakat adat terhadap hutannya. Telah terjadi perubahan berbagai nilai sosial budaya dan nilai ritual hutan. Hutan dipandang lebih menjadi sumber pendapatan uang tunai melalui ekstraksi hasil hutan kayu. Perubahan pandangan ini menurut Tokede, *et al.* (2004) telah merubah ekonomi rumah tangga sebagian masyarakat adat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi uang (konsumtif). Mereka tetap menganut prinsip hidup kekinian.

Sebagian masyarakat sadar bahwa hutan merupakan penyangga kehidupan mereka yang berfungsi sebagai penyimpan air maupun obyek kekayaan hak adat bagi keturunan mereka. Namun, mereka sangat setuju dan mengharapkan ada pihak luar, baik pemerintah atau pengusaha, yang membantu memungut hasil hutan kayu dan mengkonversi hutan mereka menjadi perkebunan (kakao, pisang abaka, atau hutan tanaman dengan jenis tanaman kehutanan serbaguna).

Fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa kapasitas masyarakat adat untuk memanfaatkan hutan adatnya secara mandiri masih terbatas. Mereka masih sangat tergantung kepada pemerintah dan pihak ketiga atau pihak luar. Jika kondisi masyarakat seperti itu dibiarkan berlanjut, tanpa adanya penyuluhan dan pendampingan yang intensif, maka kearifan lokal dalam pengelolaan hutan adat dikhawatirkan secara perlahan akan hilang dan sumberdaya hutan adat akan terus terdegradasi. Bahkan, tidak mustahil yang tersisa hanya kesengsaraan bagi generasi mendatang dan punahnya suatu budaya bangsa.

Ketergantungan masyarakat lokal terhadap pemerintah dalam hal pemanfaatan areal hutan bekas KOPERMAS sangat tinggi. Fakta ini terungkap ketika masyarakat lebih bersikap menyerahkan keputusan kepada pemerintah

untuk menentukan pemanfaatan areal bekas tebangan pada lahan adat mereka. Masyarakat adat sama sekali tidak memiliki inisiatif untuk memanfaatkan aset yang ada. Di sisi lain, tersirat keinginan masyarakat agar pemerintah mau memberikan subsidi untuk membangunkan lahan kebun kakao bagi mereka. Mereka terus menunggu dan mengharapkan uluran tangan pemerintah melalui instansi terkait yang berkompeten. Sebaliknya instansi teknis, seperti Dinas Kehutanan dan Dinas Perkebunan, belum memprogramkan pola pemanfaatan areal bekas tebangan sebagai salah satu implementasi tugas dan fungsi pokok perberdayaan masyarakat lokal.

Ketergantungan masyarakat lokal yang tinggi terhadap pihak luar juga tampak pada beberapa kasus. Salah satu kasus terkait dengan jenis tanaman kehutanan serbaguna (*multi purpose tree species*) yang dibagikan secara cuma-cuma oleh Dinas Kehutanan untuk di tanam di lahan adat. Setelah mereka tanam, ternyata mereka meminta biaya penanaman kepada Dinas Kehutanan. Mereka beranggapan bahwa program apapun yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan adalah proyek pemerintah yang ada anggarannya. Ini merupakan salah satu faktor penyebab gagalnya program pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan selama ini. Hal ini juga menjadi indikator bahwa partisipasi masyarakat dalam program pembangunan masih dalam taraf partisipasi karena dorongan, dan belum sampai pada taraf partisipasi spontan.

### ***Aspirasi Masyarakat Adat terhadap Masa Depannya***

Secara verbal terungkap adanya keinginan masyarakat adat untuk selalu meningkatkan taraf kehidupannya. Beberapa indikator diuji dalam penelitian ini untuk menilai sejauh mana keinginan tersebut tercermin di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sebagian indikator tersebut menunjukkan bahwa keinginan masyarakat baru mencapai taraf normatif dari sebuah komunitas yang mulai belajar berinteraksi dengan kelompok masyarakat lain yang relatif lebih maju.

Kesadaran terhadap pentingnya pendidikan merupakan salah satu indikator yang mendukung aspirasi masyarakat adat terhadap masa depannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kesadaran untuk menyekolahkan anak-anak mereka sampai ke perguruan tinggi, terutama untuk anak laki-laki. Sedangkan indikator lain

seperti alokasi pendapatan, alokasi waktu kerja, adopsi teknologi budidaya komoditas unggul, serta kemandirian untuk mencapai tujuan yang diinginkan dianggap belum menjadi pendukung. Nilai indikator yang digunakan untuk menilai aspirasi masyarakat adat terhadap masa depannya disajikan pada Tabel 6.

Kesadaran terhadap pendidikan dianggap bernilai positif terhadap upaya perbaikan tingkat kehidupan masyarakat adat di masa mendatang. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki, masyarakat merasa akan lebih mampu untuk menilai potensi sumberdaya yang dimiliki, memanfaatkannya secara optimal dan mencari solusi atas kendala-kendala yang selama ini dialami. Pada kenyataan, pendidikan yang tinggi sebenarnya belum menjamin aspirasi masyarakat menjadi lebih maju. Umumnya, masyarakat adat yang sudah menjadi sarjana, bila kembali ke komunitas adatnya, lambat laun kembali kepada kehidupan tradisionalnya dan terikat hukum adat.

Kesadaran terhadap pentingnya pendidikan juga belum sepenuhnya tercermin dalam kehidupan masyarakat. Hanya 4 KK atau sekitar 12,5% dari keluarga pemilik ulayat lahan pada kedua KOPERMAS yang menyekolahkan anaknya sampai ke perguruan tinggi. Nilai-nilai adat dan rendahnya rata-rata pendapatan tunai keluarga diduga merupakan faktor penyebabnya. Dalam pandangan masyarakat adat, kaum laki-lakilah yang diprioritaskan untuk memperoleh pendidikan setinggi-tingginya. Sedang kaum perempuan, karena pada akhirnya mereka nantinya akan menikah dan harus menjadi ibu rumah tangga, maka mereka tidak perlu sekolah tinggi-tinggi (biasanya cukup tamat SMP). Selain rendahnya pendapatan keluarga, rendahnya motivasi dan keinginan generasi muda untuk sekolah juga dianggap sebagai penghambat perbaikan tingkat pendidikan masyarakat.

Alokasi pendapatan yang menunjukkan pola pemanfaatan pendapatan yang diperoleh setiap

keluarga menjadi salah satu petunjuk sejauh mana masyarakat adat melihat kehidupan mereka di masa sekarang dan akan datang. Dalam konteks perbaikan kualitas hidup, pendapatan adalah modal yang harus dialokasikan untuk membiayai upaya pencapaian tingkat kehidupan yang diinginkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar anggota masyarakat belum mempunyai strategi yang baik dalam mengalokasikan pendapatannya. Pendapatan yang diperoleh sebagian besar masih dialokasikan untuk membeli barang-barang konsumtif, bukan untuk barang dan bahan modal kerja. Beberapa dari anggota masyarakat adat setempat memang ada yang menabung di bank, tetapi motivasi menabung tersebut bukan karena alasan untuk meningkatkan atau mengamankan modal usaha untuk periode berikutnya, namun lebih untuk sekedar keamanan sosial, yaitu sebagai persiapan jika sewaktu-waktu harus membayar mas kawin atau denda adat.

Pada dasarnya masyarakat adat mempunyai modal dasar yang sangat besar yang jika dikelola secara optimal akan sangat menunjang perbaikan tingkat kehidupannya. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa masih banyak lahan-lahan subur yang belum dimanfaatkan. Di lain pihak, beberapa komoditas pertanian seperti kakao dan buah merah serta komoditas peternakan seperti sapi dan kambing yang bernilai ekonomi cukup tinggi, dapat hidup dan berkembang dengan baik. Tetapi sangat sedikit anggota masyarakat yang mau mengusahakannya. Mereka selalu menunggu uluran tangan pemerintah maupun pihak luar untuk membantu. Ketergantungan mereka sangat tinggi terhadap pihak luar.

Perilaku kerja dan cara pengalokasian waktu kerja masyarakat umumnya kurang efektif. Fakta ini ditunjukkan oleh lebih besarnya alokasi waktu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif daripada yang dialokasikan untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki. Satu indikator yang sangat jelas dari

**Tabel 6.** Nilai indikator aspirasi masyarakat adat terhadap masa depannya

No	Indikator	Nilai	
		Bondi Indah	Meyaususra
1.	Kesadaran terhadap pendidikan	+	+
2.	Alokasi pendapatan	(-)	(-)
3.	Alokasi waktu kerja	(-)	(-)
4.	Adopsi teknologi	(-)	(-)
5.	Kemandirian	(-)	(-)

perilaku kerja adalah bahwa masyarakat lokal umumnya ingin memperoleh uang tunai tanpa memikirkan apakah uang tunai yang diterima itu layak atau tidak dengan nilai sumberdaya yang dikorbankan. Salah satu contoh konkret terkait penjualan Kakao. Jika ada pedagang pengumpul menawar biji kakao basah yang mereka produksi dengan harga sebesar Rp 2.500/kg, maka tanpa pikir panjang mereka akan menjualnya. Padahal jika mereka mengeringkan biji kakao tersebut sampai kering angin, harganya bisa mencapai Rp.8.500/kg.

Kakao adalah komoditas yang diusahakan hampir seluruh anggota masyarakat pemilik adat pada kedua KOPERMAS. Kedua lokasi merupakan salah satu wilayah sentra produksi Kakao di Kabupaten Manokwari. Luas tanaman komoditas ini bervariasi antara 0,5 sampai 2 hektar per keluarga. Hasil dari komoditas ini merupakan sumber pendapatan tunai yang sangat dominan bagi masyarakat adat, karena pada umumnya hasil berladang dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan pangan keluarga. Di tingkat petani, kakao dihargai oleh pedagang pengumpul sebesar Rp. 2.500/kg untuk biji basah dan Rp. 8.500/kg untuk biji kering angin. Sedangkan harga di tingkat pedagang penampung di Kota Manokwari untuk biji basah Rp. 3000/kg dan biji kering Rp. 10.000/kg.

Teknologi pengolahan biji kakao oleh masyarakat dilakukan sekedarnya saja dan mengikuti kemampuan dan pengalaman mereka sendiri. Cara-cara pembudidayaan tanaman kakao, pengolahan buah dan pengeringan biji yang diperoleh dari hasil penyuluhan oleh PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) setempat masih sangat sedikit yang diterapkan masyarakat. Hal yang sama juga terjadi pada pemeliharaan berbagai jenis ternak yang dimiliki. Faktor penyebab rendahnya adopsi teknologi usaha tani oleh masyarakat adat belum dapat diidentifikasi secara tepat. Namun pengamatan dan pengalaman menunjukkan bahwa umumnya masyarakat adat tidak sabar dan tidak memiliki etos kerja yang tinggi seperti kebanyakan masyarakat petani di Jawa atau di daerah lain. Rendahnya kepemilikan modal untuk membiayai penerapan teknologi yang ditawarkan dan kecilnya alokasi waktu untuk pengelolaan sumberdaya mereka diduga juga merupakan faktor penyebabnya. Mereka umumnya masih memegang prinsip tradisional yang mereka anut bahwa alam masih menyediakan berbagai kebutuhan hidup,

dan mereka tinggal mengambilnya. Apa yang diperoleh hari ini habis untuk hari ini, kebutuhan untuk besok dipikirkan besok saja. Inilah prinsip hidup kekinian yang dimaksudkan oleh Tokede *et al.* (2004).

Pernyataan sikap dan tindakan yang tertangkap selama penelitian menunjukkan adanya suatu ketergantungan yang sangat tinggi dari masyarakat adat terhadap pihak luar dalam upaya mereka memperbaiki tingkat kehidupannya. Sesuatu yang dimiliki yang sebenarnya bermanfaat untuk diri mereka sendiri. Misalnya, memangkas cabang-cabang pohon kakao, membuat kandang ternak, bahkan memperbaiki rumah. Namun, umumnya mereka baru akan melakukan aksi bila mereka dibayar atau disiapkan bahannya. Hal yang sama juga terjadi pada pemanfaatan areal bekas tebangan KOPERMAS. Meskipun sudah ada keinginan untuk mengkonversi lahan tersebut menjadi perkebunan, tetapi mereka selalu mengharapkan adanya pihak lain untuk melakukannya. Sikap ini dinilai merupakan faktor penghambat upaya pemberdayaan masyarakat adat. Secara tidak langsung, sikap demikian mengambat potensi inisiatif (prakarsa) dari dalam diri masyarakat itu sendiri. Masyarakat hanya bersedia melakukan sesuatu bila ada insentif meskipun kegiatan itu adalah untuk kepentingan mereka sendiri. Kapasitas masyarakat adat dalam mengoptimalkan potensi yang mereka miliki secara spontan masih sulit diberdayakan.

Tingginya ketergantungan terhadap pihak lain menunjukkan rendahnya sifat kompetitif (daya saing) masyarakat dalam mencapai sesuatu yang diinginkan. Sikap ini muncul diduga karena dalam tingkat kehidupan mereka selama ini segala sesuatu yang mereka butuhkan tersedia di lingkungan mereka tanpa harus menanam maupun memeliharanya. Ketika pola kehidupan mereka berubah akibat semakin intensifnya interaksi sosial dengan komunitas masyarakat lain yang sudah maju, mereka belum mampu mereduksi pola pikir lama mereka. Transfer teknologi melalui interaksi sosial belum sepenuhnya dapat diandalkan, sehingga pendampingan masih merupakan satu-satunya pendekatan untuk menerobos pola adat dan pola pikir mereka.

Faktor lain yang diduga turut berperan dalam menumbuhkan sikap ketergantungan masyarakat terhadap pihak luar adalah kurang tepatnya pola pendekatan pembangunan

masyarakat yang selama ini diterapkan. Pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pihak lain selama ini berbentuk program bantuan, mulai dari pembangunan rumah sehat, pembangunan kebun-kebun industri (terutama kakao), sampai pada bantuan ternak (sapi, kambing, ayam). Semua program tersebut diberikan secara cuma-cuma. Bahkan untuk bidang usaha kebun dan ternak, bantuan diberikan sampai biaya pemeliharaannya. Model pendekatan demikian secara tidak sadar telah membentuk pola pikir masyarakat bahwa kalau perlu sesuatu mereka cukup meminta bantuan kepada pemerintah ataupun pihak lain yang ikut dalam program pembangunan di wilayahnya.

Hal mendasar yang berpengaruh terhadap perilaku masyarakat adat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdayanya diduga terkait erat dengan cara pandang mereka terhadap hidup dan kehidupan. Masyarakat adat dalam menjalani hidup cenderung bersikap dan bertindak dengan orientasi kekinian dan *instant*. “*Apa yang dihasilkan hari ini, habis hari ini, dan untuk kebutuhan besok, dipikirkan besok saja*”. Prinsip hidup demikian tentunya secara perlahan perlu diubah dan upaya untuk mengubahnya menjadi prioritas dan tanggungjawab banyak pihak, khususnya pemerintah dengan segala kewenangan dan kebijakan program yang dimilikinya.

## **Kapasitas Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumberdaya Alamnya**

### ***Perladangan Berpindah***

Masyarakat adat pemilik areal KOPERMAS Putra Bondi Indah dan KOPERMAS Meyaususra pada umumnya adalah petani peladang berpindah. Komoditas utama yang diusahakan terbatas pada tanaman sayuran dan umbi-umbian seperti cabai, tomat, kacang panjang, terong, ubi jalar, keladi, singkong, dan jenis-jenis sayuran lainnya. Luas ladang dan jenis komoditas yang ditanam setiap keluarga sangat bervariasi sesuai dengan ketersediaan tenaga kerja dalam keluarga dan iklim. Perladangan umumnya dilakukan dengan pola tanam multikultur, yaitu dalam areal ladang yang sama ditanami lebih dari satu jenis komoditas. Luas ladang tanaman bahan makanan berkisar antara 0,25 sampai 0,5 ha/KK, sedangkan lahan kebun kakao berkisar antara 0,5 sampai 2,0 ha/KK.

Pembukaan ladang dilakukan dengan teknik tebas bakar dan berlangsung di lahan-lahan yang berdekatan dengan pemukiman yang mudah dijangkau. Dengan teknik tebas bakar, areal yang akan dijadikan ladang dibersihkan dari semak dan rerumputan dengan cara ditebas. Sisa-sisa pembersihan tersebut dibiarkan sampai kering untuk selanjutnya dibakar. Menurut masyarakat, abu sisa pembakaran serasah/ bahan-bahan tanaman yang sudah ditebas dan dikeringkan merupakan sumber kesuburan ladang mereka. Pandangan ini adalah wajar karena lahan-lahan kebun masyarakat memiliki solum tanah dangkal, sedikit berbatu, didominasi oleh jenis tanah podsolik merah kuning dan sedikit berliat. Persiapan lahan ini biasanya dilakukan pada akhir musim panas.

Benih dari beberapa jenis sayuran seperti tomat dan cabai merah dibeli dari toko. Sebelum ditanam, benih tersebut disemaikan terlebih dahulu. Untuk komoditas yang lain, bibitnya diperoleh dari kebun sendiri. Sebelum penanaman, masyarakat tidak mengolah tanahnya terlebih dahulu. Bibit langsung ditanam pada lubang-lubang tanam yang dibuat dengan tugal. Pemeliharaan dan pemupukan tanaman jarang dilakukan. Praktek pemeliharaan yang dilakukan terbatas pada penyiangan, sedang pemupukan biasanya dilakukan dengan pemberian pupuk kandang pada saat penanaman. Pupuk buatan dan pestisida belum lazim digunakan oleh masyarakat. Pemanenan hasil ladang dilakukan dengan sistem panen menurut kebutuhan. Selama tanaman di ladang tersedia, panen terus dilakukan. Frekuensi panen tidak tentu, terkadang setiap hari atau berselang setiap minggu sampai persediaan tanaman masak panen habis. Hasil panen tersebut sebagian dikonsumsi sendiri dan sebagian langsung dijual di pasar lokal.

### ***Pemeliharaan Ternak***

Salah satu ciri khas masyarakat Arfak pada umumnya dalam kegiatan usaha tani ladang adalah selalu memelihara berbagai jenis ternak seperti babi, sapi, kambing dan ayam. Ternak babi merupakan ternak yang paling umum dipelihara. Selain karena dapat mendatangkan uang tunai, babi memiliki nilai adat yang tinggi, yaitu sebagai mas kawin atau untuk membayar denda adat. Kepemilikan babi juga menjadi ukuran status sosial sebuah keluarga dalam komunitas masyarakat adat terutama suku besar Arfak.

Selain babi, ternak yang dimiliki masyarakat diperoleh dari bantuan pemerintah melalui *Sustainable Agriculture Development Project* (SADP) dan bantuan langsung dari Dinas Peternakan kabupaten. Saat ini, ternak bantuan tersebut hanya tersisa pada beberapa keluarga saja. Sebagian yang lain sudah dijual. Masyarakat tidak memiliki keinginan untuk menggandakan populasi ternak mereka. Jumlah ternak sapi yang dibagikan oleh SADP itu saja yang dipelihara. Setelah besar, ternak tersebut seluruhnya dijual dan mereka kembali keseharian mereka, yakni usaha ladang dan meramu.

Pemeliharaan ternak oleh masyarakat dilakukan secara ekstensif. Masyarakat melepas ternak di sekitar pekarangan rumah ataupun di kebun mereka, sehingga sering merusak tanaman yang mereka tanam. Pengandangan ternak belum lazim dilakukan. Masyarakat berpandangan bahwa jika ternak dikandangan, mereka harus menyediakan pakannya sementara kalau dilepas, ternak bisa mencari pakannya sendiri. Pola pikir tradisional demikian hendaknya menjadi subyek penyuluhan oleh instansi teknis terkait.

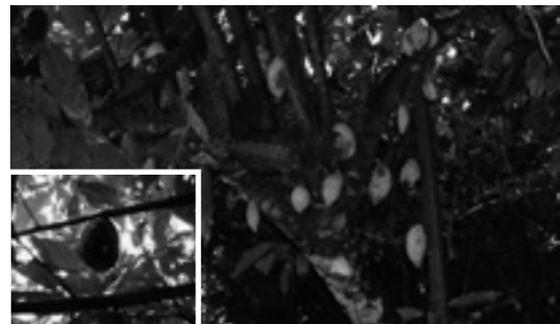
### **Pengelolaan Kakao**

Kakao dapat dikatakan sebagai komoditas unggulan di Ransiki dan Manokwari maupun Kawasan Pantai Utara Manokwari (termasuk Kampung Nuni-Asai). Seluruh anggota masyarakat adat pemilik ulayat pada kedua KOPERMAS memiliki kebun kakao dengan luasan yang bervariasi antara 0,5 sampai 2 ha/KK. Sebagian dari kebun kakao tersebut merupakan bantuan dari proyek *Sustainable Agriculture Development Project* (SADP) yang diluncurkan oleh Dinas Perkebunan bekerja sama dengan UNDP pada tahun 1980-an sampai akhir 1990-an. Sebagian lainnya merupakan hasil swadaya masyarakat.

Untuk penanaman kakao secara swadaya, masyarakat memperoleh bibit dari pemerintah yang disalurkan melalui PPL setempat. Benih didatangkan dari Jember, Jawa Timur. Teknik penanaman kakao meliputi pembuatan lubang tanam dan penentuan jarak tanam sudah dilakukan sesuai dengan yang disyaratkan. Sementara untuk aspek pemeliharaannya, seperti penghilangan cabang air, penaungan dan sanitasi lingkungan tumbuh, masih sedikit dilakukan. Hal ini terlihat dari banyaknya cabang air pada tanaman kakao, pohon penaung jarang dipangkas dan banyaknya tanaman

pengganggu di kebun kakao mereka. Pemupukan tanaman juga tidak pernah dilakukan. Dengan pola pemeliharaan tanaman kakao demikian, selain mengakibatkan produktivitas tanamannya rendah, buah yang dihasilkannya juga rentan terhadap serangan hama dan penyakit. Hal ini terlihat dari sedikitnya buah kakao pada pohon, dan terserangnya banyak sekali buah kakao yang masih muda oleh hama busuk buah. Akibat serangan hama tersebut, buah menjadi mudah kering dan berwarna hitam.

Teknik pemanenan dan pengolahan paska panen dilakukan dengan sangat sederhana. Pemanenan kakao dilakukan tanpa alat pemotong buah, tetapi hanya dengan tangan, yaitu dengan memutar buah sampai tangkainya lepas. Buah yang dipetik selanjutnya dibelah dengan parang dan dikeluarkan bijinya. Biji kakao yang diperoleh ada yang langsung dijual dalam keadaan segar atau dikeringkan terlebih dahulu. Pengeringan biji kakao dilakukan dengan menjemurnya di bawah terik matahari. Penjemuran dilakukan di atas jalan aspal atau dengan alas terpal di halaman rumah. Dalam



**Gambar 16.** Kurang intensifnya pemeliharaan menyebabkan tanaman kakao banyak diserang hama. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan petani dan mahalnya harga pestisida sehingga masyarakat enggan membelinya



**Gambar 17.** Cara pengeringan biji kakao yang dilakukan masyarakat adat adalah dengan menjemurnya di jalan aspal atau di atas terpal. Inovasi teknologi, misalnya introduksi alat pengering tenaga surya akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas biji kakao sehingga dapat meningkatkan harga jualnya

proses penjemuran, rendahnya kadar air biji kakao ditunjukkan dengan kegetasan bijinya. Apabila biji kakao sudah dapat dipatahkan dengan tangan, penjemuran sudah dianggap cukup.

Biji kakao dipasarkan melalui para pedagang pengumpul yang datang dan membeli biji di kampung mereka. Harga jual diputuskan dengan cara tawar-menawar antara pemilik dan pembeli. Di tingkat pedagang pengumpul, harga biji kakao basah adalah sebesar Rp.2.500/kg, dan biji kering angin Rp. 8.500/kg. Oleh para pedagang pengumpul, biji kakao tersebut selanjutnya dijual ke pedagang penampung di Manokwari dengan harga Rp. 10.000/kg kering angin.

### **Pengelolaan Buah Merah**

Buah merah (*Pandanus conoideus*) merupakan tanaman endemik Papua yang akhir-akhir ini meningkat pamor dan nilai ekonominya berkat khasiat obat dari minyaknya. Secara alami, tanaman ini tumbuh tersebar di seluruh Papua, terutama pada daerah-daerah lembab. Tanaman ini relatif mudah dibudidayakan dan memiliki toleransi yang tinggi terhadap berbagai kondisi lingkungan.

Sampai saat ini, pemanfaatan buah merah oleh masyarakat dilakukan dengan mengandalkan tanaman yang tumbuh secara alami di lahan ulayat mereka. Hanya beberapa orang saja yang sudah membudidayakannya dalam skala sangat terbatas (beberapa pohon saja). Selain dijual dalam bentuk buah, sebagian anggota masyarakat menjualnya dalam bentuk minyak. Di pasar Ransiki, buah merah dijual dengan harga antara Rp. 25.000 sampai Rp. 50.000/buah, tergantung ukurannya. Di pasar Manokwari, buah tersebut dijual dengan harga antara Rp. 50.000 sampai Rp. 100.000/buah tergantung pada ukuran buah.

Pembuatan minyak buah merah dilakukan masyarakat dengan cara merebus buah dan menyaring minyak yang dihasilkan atau dengan menggantung (menggantung buah dalam karung sampai keluar minyak) dan menampung minyak yang keluar. Minyak buah merah yang dihasilkan dijual dalam botol kemasan air mineral atau botol kecap besar dengan harga antara Rp. 100.000 sampai Rp. 250.000/botol tergantung ukuran botolnya. Sedangkan hasil pengolahan yang dilakukan oleh industri rumah tangga dengan kualitas minyak yang lebih baik dan lebih murni

harganya mencapai Rp 150.000/100 ml. Kedua komoditas inilah yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan tunai keluarga, di samping hasil hutan kayu. Sayangnya komoditas ini belum dibudidayakan secara intensif oleh masyarakat lokal. Buah merah yang dipanen berasal dari tumbuhan buah merah di alam. Jika ada tumbuhan buah merah di kebun penduduk, itupun bukan sengaja ditanam, tetapi telah ada sebelum kebun dibuka dan mereka hanya memelihara saja.

### **Pengelolaan Komoditas Lain**

Berbagai jenis pisang tumbuh sangat subur di lahan masyarakat adat, meskipun tidak pernah dilakukan pemeliharaan. Karena hampir setiap keluarga memiliki tanaman ini, harganya di pasar Ransiki sangat rendah yakni berkisar antara Rp. 3.000 sampai Rp. 5.000/tandan. Bila hasil panennya banyak, kadang-kadang masyarakat menjualnya ke Manokwari. Jenis pisang yang paling banyak ditanam masyarakat lokal adalah pisang kapok (sebutan lokal). Pada saat-saat tertentu, sekalipun sifatnya temporer, ada pembeli dari Biak yang memborong hasil panen pisang masyarakat untuk dikapalkan ke Biak.

Jenis tanaman buah-buahan yang banyak dijumpai di pekarangan masyarakat pemilik ulayat pada kedua KOPERMAS adalah berbagai jenis mangga. Yang umum ditemukan adalah jenis mangga kueni. Jenis tanaman buah-buahan lain adalah durian dan rambutan. Jenis rambutan yang banyak ditanam masyarakat lokal adalah rambutan aceh (sebutan lokal). Bila musim berbuah, harganya sangat murah, meskipun kadang-kadang pembelinya datang dari Kota Manokwari maupun dari luar Kota Manokwari.



**Gambar 18.** Produk dari *Pandanus conoideus* berupa Buah Merah yang di pasar setempat berharga sekitar Rp 50.000 per buah dan minyak ekstrak buah merah yang dijual di pasaran dengan harga Rp 150.000 per 100 ml

## Kesimpulan dan Rekomendasi

### Kesimpulan

1. Masyarakat adat pemilik areal KOPERMAS Putra Bondi Indah dan KOPERMAS Meyaususra berasal dari Suku Besar Arfak, yang merupakan suku asli di Kabupaten Manokwari.
2. Pola kepemilikan dan penguasaan sumberdaya alam, termasuk hutan bersifat komunal dan individual. Pewarisan hak menganut sistem patrilineal. Pengaturan pemanfaatan lahan dan hutan adat diatur oleh kepala suku atau kepala marga/klan yang secara adat memiliki hak kepemilikan dan penguasaan lahan/hutan adat kelompok marga/klan berdasarkan sistem patrilineal tersebut.
3. Masyarakat adat masih menggantungkan hidupnya dari alam dengan pola pengelolaan dan pemanfaatan yang subsisten melalui kegiatan meramu (ekstraksi hasil hutan) dan perladangan berpindah.
4. Sumber pendapatan tunai masyarakat adat yang bermatapencaharian utama sebagai petani peramu adalah kakao dan buah merah, disamping hasil hutan kayu. Sedangkan usaha ternak masih terbatas sebagai hewan kesayangan dan sebagai cerminan status sosial dalam kelompoknya.
5. Hewan piaraan yang memiliki nilai budaya tinggi adalah babi, sedangkan ternak sapi dan kambing adalah hewan yang diintroduksi melalui program bantuan dari pemerintah.
6. Sebagian masyarakat adat telah dapat mengalokasikan pendapatan tunai keluarga untuk tujuan jangka panjang, khususnya bagi masyarakat yang bermukim dekat ibu kota kabupaten. Masyarakat yang bermukim jauh dari perkotaan umumnya mengalokasikan pendapatan tunai untuk pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersier.
7. Persepsi masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam di wilayah adatnya masih terbatas dan masih memiliki sifat ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah maupun pihak luar.
8. Pola pikir yang dianut oleh masyarakat adat dalam tata kehidupannya adalah pola pikir kekinian dan *instant* karena mereka belum mampu meningkatkan kapasitas dirinya secara mandiri dalam upaya memperbaiki taraf hidupnya.
9. Masyarakat adat belum memiliki aspirasi untuk mengembangkan dan mengoptimalkan potensi sumberdaya yang ada dalam wilayah adatnya untuk tujuan jangka panjang secara spontan, masih menunggu pihak pemerintah atau pihak lain untuk membantunya.
10. Keterikatan terhadap nilai adat, rendahnya kapasitas masyarakat dalam mengadopsi inovasi baru dan sifat ketergantungan yang tinggi terhadap pihak lain di luar masyarakat adatnya merupakan faktor-faktor penghambat keberhasilan program pemberdayaan masyarakat pemilik ulayat di wilayah studi.
11. Pemerintah daerah, dalam hal ini instansi kehutanan dan perkebunan, belum memiliki program yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan areal bekas tebangan konsesi KOPERMAS yang benar-benar sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan masyarakat adat dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat maupun pelestarian sumberdaya hutan.
12. Pola pendekatan pemberdayaan masyarakat melalui subsidi dan proyek bantuan hanya meningkatkan ketergantungan masyarakat dan tidak meningkatkan kapasitas menuju kemandirian.

## Rekomendasi

1. Program pembangunan yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam untuk pemberdayaan masyarakat adat sebaiknya dilakukan dengan pendekatan pendampingan.
2. Pengelolaan dan pemanfaatan areal bekas tebangan KOPERMAS di wilayah adat sebaiknya difasilitasi oleh instansi teknis terkait yang secara pro-aktif mengambil peran dan melibatkan masyarakat secara aktif sejak proses perencanaan sampai pada pelaksanaan kegiatan di lapangan.
3. Apabila pengelolaan dan pemanfaatan akan melibatkan pihak ketiga (investor), maka pemerintah daerah wajib memfasilitasi dan melakukan pembinaan serta pengawasan secara intensif.

## Daftar Pustaka

- Simon, H. 1993. Hutan Jati dan Kemakmuran. Problematika dan Strategi Pemecahannya. Aditya Media. Yogyakarta.
- Laksono, P.M., Rianty, A., Hendrijani, A.B., Gunawan dan Mandacan, A. 2001. Igya Ser Hanjop; Masyarakat Arfak dan Konsep Konservasi. Kerjasama Pusat Studi Asia Pasifik Universitas Gadjah Mada dengan Yayasan Bina Bumi Lestari dan Yayasan Keanekaragaman Hayati Yogyakarta.
- Mansoben, J.R. 2002. Pemilikan SDA dan Dinamikanya Menurut Kebudayaan Masyarakat Adat Papua. *Dalam* P3FED. 2002. Pokok-pokok Pikiran Tentang Pemberdayaan Hak-Hak Masyarakat Adat dalam Eksploitasi Sumberdaya Alam di Provinsi Papua.
- P3FED-NRM III. 2004. Kajian Model-model Mekanisme Pemberian Kompensasi Hak Masyarakat adat Atas Pengelolaan dan Penggunaan Tanah. Pusat Penelitian Pemberdayaan Fiskal dan Ekonomi Daerah Universitas Negeri Papua bekerjasama dengan Natural Resources Management Program III Manokwari.
- Tokede, M. J., D. Wiliam, S. McGrath dan Y. Gandhi, 2004. Local People's Access to Forest-Based Development Opportunities in Manokwari District. Policy Brief. Center for International Forestry Research. Bogor.
- Widodo, 2002. Peran Pengelolaan Hutan Oleh Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat dan Kelestarian Hutan. Kasus KOPERMAS Warbiadi – Oransbari. Laporan Penelitian. Fakultas Kehutanan UNIPA. (tidak diterbitkan).
- Worembai, K. 2003. Strategi Kebijakan dan Kiat Bisnis KOPERMAS dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Papua. Makalah Semiloka Harapan dan Strategi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari di Papua, WWF Indonesia Region Sahul-Papua. Jayapura.



Center for International Forestry Research (CIFOR) adalah lembaga penelitian kehutanan internasional terdepan, yang didirikan pada tahun 1993 sebagai tanggapan atas keprihatinan dunia akan konsekuensi sosial, lingkungan dan ekonomi yang disebabkan oleh kerusakan dan kehilangan hutan. Penelitian CIFOR ditujukan untuk menghasilkan kebijakan dan teknologi untuk pemanfaatan dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara-negara berkembang yang bergantung kepada hutan tropis untuk kehidupannya. CIFOR adalah salah satu di antara 15 pusat Future Harvest di bawah Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR). Berpusat di Bogor, Indonesia, CIFOR mempunyai kantor regional di Brazil, Burkina Faso, Kamerun dan Zimbabwe, dan bekerja di lebih dari 30 negara di seluruh dunia.

#### Donatur

CIFOR menerima pendanaan dari pemerintah, organisasi pembangunan internasional, yayasan swasta dan organisasi regional. Pada tahun 2004, CIFOR menerima bantuan keuangan dari Australia, African Wildlife Foundation (AWF), Asian Development Bank (ADB), Belgia, Brazil, Kanada, Carrefour, Cina, CIRAD, Conservation International Foundation (CIF), Komisi Eropa, Finlandia, FAO, Ford Foundation, Perancis, Jerman Agency for Technical Cooperation (GTZ), German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), Indonesia, International Development Research Centre (IDRC), International Fund for Agricultural Development (IFAD), Innovative Resource Management (IRM), International Tropical Timber Organization (ITTO), Italy, Japan, Korea, Belanda, Norwegia, Organisation Africaine du Bois (OAB), Overseas Development Institute (ODI), Peruvian Institute for Natural Renewable Resources (INRENA), Filipina, Swedia, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Swiss, The Overbrook Foundation, The Nature Conservancy (TNC), Tropical Forest Foundation, Amerika Serikat, Inggris, United Nations Environment Programme (UNEP), Waseda University, World Bank, World Resources Institute (WRI) dan World Wide Fund for Nature (WWF).



Program Forests and Governance di CIFOR mengkaji cara pengambilan dan pelaksanaan keputusan berkenaan dengan hutan dan masyarakat yang hidupnya bergantung dari hutan. Tujuannya adalah meningkatkan peran serta dan pemberdayaan kelompok masyarakat yang kurang berdaya, meningkatkan tanggung jawab dan transparansi pembuat keputusan dan kelompok yang lebih berdaya dan mendukung proses-proses yang demokratis dan inklusif yang meningkatkan keterwakilan dan pengambilan keputusan yang adil di antara semua pihak.